

**PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Putri Indraningrum
NIM 09102241029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JANUARI 2015**


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN” yang disusun oleh Putri Indraningrum, NIM 09102241029 ini telah disetujui untuk diujikan


Yogyakarta, 31 Oktober 2014

Dosen Pembimbing I

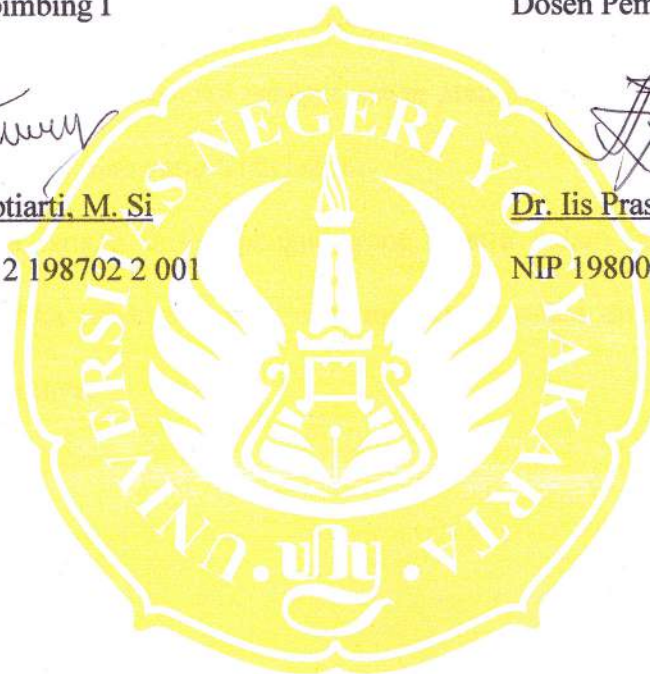
Dosen Pembimbing II


S. Wisni Septiarti, M. Si

NIP19580912 198702 2 001


Dr. Iis Prasetyo, MM

NIP 19800924 200501 1 002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Indraningrum

NIM : 09102291029

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Desember 2014
Yang Menyatakan,



Putri Indraningrum
NIM. 09102241029

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN” yang disusun oleh Putri Indraningrum, NIM 09102241029 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Desember 2014 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
S. Wisni Septiarti, M. Si.	Ketua Penguji		06-01-2015
Drs. Mulyadi, M. Pd.	Sekretaris Penguji		07-01-2015
Dr. Udik Budi Wibowo	Penguji Utama		05-01-2015
Dr. Iis Prasetyo, MM.	Penguji Pendamping		06-01-2015

14 JAN 2015

Yogyakarta.....

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Maryanto, M. Pd.

NIP 19600902 198702 1 001

MOTTO

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. (*IbuKartini*)

Tidak ada hasil tanpa usaha, tidak ada usaha tanpa hasil (*Penulis*)

PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah Subhanahuwata'alla

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Bapak dan Ibu serta Kakak tercinta,

Atas segenap curahan kasih sayang serta doa yang tak pernah lupa mereka sisipkan, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan

PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN

Oleh
Putri Indraningrum
NIM 09102241029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menggambarkan perencanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul, 2) Menggambarkan implementasi model kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala UPT SKB Gunungkidul, pamong UPT SKB Gunungkidul, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, serta pengelola PKBM Sembada. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Peneliti merupakan instrument utama penelitian dengan dibantu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan 1). Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul dilatarbelakangi kebutuhan dana, fasilitas dan SDM, untuk mengotimalkan program, adanya komitmen dari lembaga untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program kecakapan hidup. Partisipasi Perencanaan program UPT SKB Gunungkidul melibatkan pihak dari dalam lembaga dan luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul diawali dengan kegiatan identifikasi oleh para pamong, mendengarkan masukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan, dan selanjutnya penentuan prioritas program melalui rapat koordinasi antara UPT SKB Gunungkidul dan pembuat kebijakan 2). UPT SKB Gunungkidul mengimplementasikan model kemitraan mutualistik dengan prinsip *mutual benefit*, yaitu kedua belah pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat dari kemitraan yang dilakukan. Manfaat yang diperoleh UPT SKB Gunungkidul, yaitu mendapat dukungan sumber daya, dapat menyalurkan lulusan program dan dapat mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan programnya.

Kata Kunci :Pengembangan Program, Sanggar Kegiatan Belajar, Kemitraan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui Model Kemitraan. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga studi saya lancar.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga studi saya lancar.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY yang telah memberikan kelancaran di dalam proses penelitian ini.
4. Ibu SW. Septiarti, M. Si., pembimbing I dan Bapak Dr. Iis Prasetyo, MM., pembimbing II, yang berkenan mengarahkan dan membimbing skripsi saya hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Bapak Kahyanto Utomo, SIP, Kepala UPT SKB Gunungkidul, seluruh pamong dan karyawan UPT SKB Gunungkidul, Staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul dan pengelola PKBM Sembada yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian dari awal sampai akhir.
7. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Suratman dan Ibu Nendes Purwati Siwi), kakakku tercinta (Putra Wiratmaja Perdhana) dan seluruh keluarga besarku atas segala doa, perhatian, kasih sayang dan segala dukungannya.

8. Sahabat-sahabat terbaik (Galih, Ayu, Friyant, Garindra, Widjay, Ipus, Pandu, Rofiq, Wahyu, Fatchan) yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga keikhlasan dan amal baiknya diberikan balasan dari Allah SWT, serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan terutama Pendidikan Luar Sekolah dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, Desember 2014

Penulis



Putri Indraningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	hal i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang Pengembangan Program Pendidikan Non Formal.....	10
1. Pengertian dan Kegunaan Pengembangan Program.....	10
2. Pendekatan Pengembangan Program.....	11
3. Langkah-langkah Pengembangan Program.....	12
B. Kajian tentang Perencanaan Program.....	14
1. Konsep Perencanaan Program.....	14
2. Tipe-tipe Perencanaan Program.....	15
3. Karakteristik Perencanaan.....	18

4. Prinsip Perencanaan Pendidikan Nonformal.....	19
5. Tahapan Perencanaan Program.....	20
C. Kajian tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).....	21
D. Kajian Model Kemitraan.....	22
1. Pengertian Kemitraan.....	22
2. Prinsip Menjalin Kemitraan.....	23
3. Model-model Kemitraan.....	24
E. Kajian tentang Partisipasi.....	27
F. Kerangka Pikir.....	28
G. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. <i>Setting</i> Penelitian.....	30
C. Sumber Data Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
A. Deskripsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	
Gunungkidul.....	36
1. Profil Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul.....	36
2. Visi dan Misi SKB Gunungkidul.....	36
3. Tugas Pokok UPT SKB Gunungkidul.....	37
4. Fungsi UPT SKB Gunungkidul	37
5. Keadaan Pegawai UPT SKB Gunungkidul.....	38
6. Fasilitas UPT SKB Gunungkidul.....	38
7. Program UPT SKB Gunungkidul.....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Perencanaan Program Kemitraan Sanggar Kegiatan Belajar	
Gunungkidul.....	40

a. Latar Belakang Kemitraan UPT SKB Gunungkidul.....	40
b. Partisipasi dalam Perencanaan Program UPT SKB Gunungkidul.....	43
c. Tahapan Perencanaan Program UPT SKB Gunungkidul.....	47
2. Implementasi Program Kemitraan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul.....	57
a. Model Kemitraan UPT SKB Gunungkidul.....	57
b. Mekanisme Kemitraan UPT SKB Gunungkidul.....	72
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan UPT SKB Gunungkidul.....	75
C. Ringkasan Hasil Penelitian.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data.....	32
Tabel 2. Program UPT SKB Gunungkidul.....	39
Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian.....	77

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2. Mekanisme Kemitraan.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Pedoman Wawancara untuk Kepala UPT SKB Gunungkidul.....	84
Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk Pamong Belajar.....	86
Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Pengelola Lembaga Mitra...	88
Analisis Data.....	90
Catatan Lapangan.....	108
Struktur Organisasi UPT SKB Gunungkidul.....	122
Foto Dokumentasi.....	123
Surat Keterangan Melakukan Wawancara	126
Surat Izin Penelitian.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut masyarakat untuk terus berubah mengikuti perkembangan global. Kemajuan ilmu teknologi mempengaruhi perubahan-perubahan diberbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi dan bidang yang lain. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan pendidikan masyarakat akan mampu mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada di setiap bidang kehidupan baik politik, sosial, maupun teknologi. Kemampuan masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan akan mempengaruhi masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Pendidikan diharapkan dapat semakin berkembang dengan semakin baiknya kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan diskriminasi juga akan berkurang. Namun sayangnya akses pendidikan belum seluruhnya diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terutama di daerah-daerah tertinggal. Banyak dari masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan akses pendidikan sehingga berdampak pada kebodohan yang akhirnya kembali menyebabkan kemiskinan. Belum terjangkaunya pendidikan oleh masyarakat miskin mengakibatkan banyaknya anak-anak tidak sekolah, dan tingginya kasus putus sekolah yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Meskipun saat ini pemerintah sudah menggalakkan wajib belajar 9 tahun, tetapi kenyataannya

masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang miskin belum tersentuh pendidikan.

Pemerintah menetapkan tiga jalur pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.” Sedangkan pengertian pendidikan non formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.” Pengertian pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di keluarga ataupun lingkungan. Ketiga jalur pendidikan tersebut dibentuk untuk saling melengkapi guna mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar jalur formal yang dilaksanakan sebagai salah satu implementasi dari pendidikan sepanjang hayat. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Berbeda dengan pendidikan formal yang terbatas pada umur, pendidikan non formal tidak terbatas pada umur, artinya siapapun dapat mendapatkan pembelajaran. Pendidikan non formal dapat ditempuh dari mulai

0 tahun sampai lansia sehingga pendidikan non formal memperluas kesempatan bagi orang-orang yang tidak terjangkau pendidikan formal. Secara garis besar Pendidikan non formal dibagi menjadi tujuh ranah yakni meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan non formal saat ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebelumnya SK Mendikbud RI.Nomor 023/O/1997 menyebutkan bahwa “Tugas pokok SKB: melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.” Dari SK tersebut dapat diartikan bahwa sebelumnya tugas pokok SKB melaksanakan program-program percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, maka peran dan fungsi SKB berubah sesuai dengan karakteristik dan kebijakan pemerintah Kabupaten/kota masing-masing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan non formal, SKB diharapkan mampu mengakses banyak program pendidikan non formal, SKB memiliki tanggung jawab menyelenggarakan program-program sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki SKB menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas maupun fungsinya.

Otonomi daerah mempengaruhi peran SKB dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Banyak permasalahan yang muncul melemahkan peran dan fungsi SKB sebagai penyelenggara pendidikan non formal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional bagi SKB, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, rendahnya partisipasi dan kemitraan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog “Selama ini hubungan PKBM dengan SKB seperti air dengan minyak. Sejak diberlakukan otonomi daerah, PKBM maju pesat, sementara banyak SKB yang kehilangan perannya” (Dina, 2012). Pernyataan di atas dapat menggambarkan SKB dan PKBM selama ini belum berjalan dengan sinergis dan menjalin kemitraan dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Fakta lain adalah banyak SKB yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal salah satunya SKB di Kalimantan Tengah, karena tidak ada dukungan dari pemerintah daerah setempat dan hanya mengandalkan dukungan dari APBN yang tidak mencukupi kebutuhan dana di lapangan (Anonim, 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dalam Bab IV pasal 100 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal

meliputi satuan pendidikan: lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.” (Fauzi, 2012.). Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak menyebutkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan non formal. Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan non formal hanya dilaksanakan oleh masyarakat bukan oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah hanya terfokus pada pemberian bantuan kepada satuan atau lembaga masyarakat bukan lagi kepada lembaga pemerintah. Itulah sebabnya banyak PKBM maju pesat dan SKB banyak yang kehilangan perannya seperti yang telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Banyak permasalahan yang sebenarnya dialami oleh SKB seperti keterbatasan dalam hal pendanaan dan fasilitas. Keterbatasan dana, dan fasilitas menyebabkan peran lembaga mitra sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan program di SKB. Lembaga mitra baik pemerintah maupun swasta memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh SKB. Dengan menjalin kemitraan dengan lembaga lain, SKB diharapkan dapat mengatasi kelemahan dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan programnya. Meskipun lembaga mitra mempunyai peran sangat penting, tetapi masih banyak SKB belum optimal melaksanakan kemitraan dengan lembaga lain dan hanya

mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang jumlahnya sangat terbatas dan belum dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul merupakan lembaga pendidikan non-formal di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. SKB Gunungkidul menyelenggarakan program seperti program kecakapan hidup, program peningkatan mutu tenaga kependidikan, PAUD, program pengembangan data dan informasi pendidikan non formal, dan pengembangan kurikulum. UPT SKB Gunungkidul membutuhkan dana, fasilitas, SDM yang mendukung agar dapat menyelenggarakan program-program tersebut, namun jumlah sumber daya yang dimiliki sangat terbatas.

Dana, fasilitas yang terbatas, faktor geografis dan SDM terbatas, tidak memungkinkan untuk mengembangkan program-program UPT SKB Gunungkidul secara mandiri, maka dalam menyelenggarakan program-program, UPT SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerjasama ini dilakukan agar program-program yang dilaksanakan lebih optimal dan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berencana untuk mengetahui Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan .

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain :

1. Otonomi daerah melemahkan peran dan fungsi SKB sehingga menimbulkan masalah bagi SKB, seperti kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional bagi SKB, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, rendahnya partisipasi dan kemitraan masyarakat.
2. Kemitraan antara SKB dan PKBM belum sinergis dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
3. Pemerintah hanya terfokus pada pemberian bantuan kepada satuan atau lembaga masyarakat.
4. Kemitraan SKB dengan lembaga lain belum optimal karena hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat.
5. Dana, fasilitas yang terbatas, faktor geografis dan SDM yang terbatas, tidak memungkinkan UPT SKB Gunungkidul untuk mengembangkan program-programnya secara mandiri.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada upaya yang dilakukan UPT SKB Gunungkidul dalam mengembangkan program melalui kemitraan yang dilakukan agar program dapat berjalan dengan optimal. Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun sebuah penelitian sesuai tujuan yang diharapkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh SKB Gunungkidul ?
2. Bagaimana implementasi program kemitraan yang dilakukan oleh SKB Gunungkidul ?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan perencanaan program kemitraan yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul.
2. Menggambarkan implementasi model kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul

F. Manfaat penelitian

1. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga untuk semakin meningkatkan kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain sehingga dapat melaksanakan dan mengembangkan program-program yang ada di lembaga dengan efektif serta dapat mencapai hasil optimal.

2. Bagi pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terus melakukan inovasi program-program sesuai perubahan dan perkembangan masyarakat, agar masyarakat semakin tertarik pada program-program Pendidikan Luar Sekolah

3. Bagi Pendidikan Luar Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dengan terus menjalin hubungan dengan berbagai lembaga baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di dalam maupun di luar lingkup pendidikan luar sekolah, agar program-program Pendidikan Luar Sekolah dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Pengembangan Program Pendidikan Non Formal

1. Pengertian dan Kegunaan Pengembangan Program

“Pengembangan dalam manajemen pendidikan non formal diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ini ke tingkat program yang lebih sempurna, lebih luas dan lebih kompleks” (Sudjana, 2004: 331). Dari pengertian di atas maka pengembangan program SKB dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan dan menyempurnakan program-program SKB, lebih baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada umumnya kegunaan fungsi pengembangan program adalah untuk meningkatkan dan memperluas program pendidikan (Sudjana, 2004: 331). Kegunaan pertama, menekankan pada segi kualitatif. Pengembangan diarahkan untuk menyempurnakan program-program yang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Kegunaan kedua lebih menekankan pada segi kuantitatif, yaitu hal yang diperluas adalah jangkauan program, baik jangkauan wilayah maupun jangkauan sasaran (peserta didik).

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan non formal, program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh SKB harus selalu mencapai kemajuan dan senantiasa melakukan inovasi-inovasi seiring dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Kinerja program pendidikan luar sekolah mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan (Implementing). Kinerja program dapat dilihat dengan mengacu pada pelaksanaan program yang efektif dan efisien sesuai

- aturan, pedoman atau arahan yang berlaku. Pada tahap ini pengelola dituntut mampu melaksanakan sebuah pelaksanaan program yang tepat
- 2) Peningkatan (improving). Kinerja program dilihat dari aspek kemajuan program yang dilaksanakan. Program ditinjau aspek kelemahan dan kelebihanannya secara mendalam menghasilkan rencana perbaikan. Aspek kualitas mencakup peningkatan materi, metode (how), sarana, manajemen, dll. Sedangkan aspek kuantitas lebih menitik beratkan pada akses bagi seluruh sasaran program PLS. Perbaikan atau peningkatan program menghasilkan program yang lebih kompetitif, yaitu semula program yang semula tidak maju menjadi maju dan memperkuat program yang telah maju.
 - 3) Pembaruan (innovating) menekankan dihasilkannya inovasi-inovasi dalam rangka menghasilkan program pendidikan luar sekolah yang lebih berkualitas. Dalam hal ini yang ditekankan adalah model-model pendidikan luar sekolah, cara-cara yang lebih sempurna dalam mengelola program (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 86)

Pemaparan di atas dapat diartikan bahwa program-program pendidikan luar sekolah dirancang sedemikian rupa dan melalui tahapan-tahapan sistematis dari pelaksanaan, peningkatan dan pembaruan agar nantinya program-program baru yang dilaksanakan selanjutnya lebih baik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

2. Pendekatan Pengembangan Program

Pengembangan program merupakan upaya yang memerlukan keikutsertaan semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dipandang strategis untuk mengembangkan program pendidikan nonformal adalah pendekatan partisipatif (Sudjana, 2004: 333). Para pihak yang terlibat dalam pengembangan program berpartisipasi dan berkoordinasi melakukan kegiatan bersama secara efisien dan efektif dalam mengembangkan program yang telah atau sedang dilaksanakan.

3. Langkah-langkah Pengembangan Program

Pengembangan program memerlukan serangkaian langkah yang harus dilakukan agar program-program yang dilaksanakan benar-benar mampu memberikan manfaat yang optimal. Langkah-langkah pengembangan tersebut meliputi :

a. Penentuan kebutuhan/masalah strategis.

Secara umum analisis kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi bagi pembuatan keputusan tentang petunjuk atau keberadaan program atau praktek (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 88). Analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan program yang diselenggarakan. Oleh karena itu dalam kegiatan analisis kebutuhan ini pengelola program hendaknya memperhatikan isu yang timbul di lingkungan luar. Pada umumnya isu yang muncul di lingkungan luar berkaitan dengan perkembangan lingkungan dan masyarakat.

“Berbagai isu dalam lingkungan luar lembaga yang perlu diperhatikan bagi pengembangan program pendidikan nonformal antara lain adalah perkembangan pembangunan, politik, pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, peningkatan jumlah angkatan kerja, variasi lapangan kerja, peningkatan jumlah wanita bekerja, banyaknya anak putus sekolah dan putus jenjang pendidikan formal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosial budaya” (Sudjana, 2004: 337).

b. Implementasi program.

Pada implementasi program yang mengandung berbagai rancana aksi pada umumnya dilakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. “Analisis kelayakan mencakup dua aspek yaitu analisis sumber daya dan analisis pemangku kepentingan” (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 97). Analisis

kelayakan akan mempengaruhi keberlangsungan program yang akan dilaksanakan. “Analisis sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui program yang dilakukan mendapat dukungan keuangan, fasilitas dan lainnya” (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 97). Idealnya sebuah rencana aksi dilakukan apabila hasil analisis kelayakan sumber daya menunjukkan bahwa sumberdaya tersebut mudah dan banyak khususnya sumber daya yang penting. Sedangkan untuk analisis pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa program yang dipilih mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik yang berperan sebagai pelaksana, penerima dan pengguna hasil program dimaksud (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani 2009:97).

c. Rencana Evaluasi

Secara umum evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan, dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (Sudjana, 2004: 251). Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur penting dalam evaluasi yaitu 1) kegiatan sistematis yang artinya bahwa penilaian dilakukan melalui prosedur tertentu yang tertib, 2) data atau informasi yang diperoleh melalui upaya pengumpulan, pengolahan, deskripsi dan penyajian dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah, 3) pengambilan keputusan menekankan bahwa data yang disajikan memberikan nilai berguna sebagai masukan yang berharga untuk pengambilan keputusan tentang alternative yang diambil. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan

atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Secara umum tujuan pokok kegiatan evaluasi dapat mengetahui secara pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana aksi, selanjutnya dipelajari guna perbaikan rencana aksi / program di masa yang akan datang (Yoyon Suryono Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 98).

B. Kajian tentang Perencanaan Program

1. Konsep Perencanaan Program

Perencanaan didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 2004: 57). Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Udin Syaefudin & Abin Syamsuddin, 2005: 17). Menurut Siagian (1983), perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan dimasa mendatang (Endang Soenarya, 2000: 37).

Pengambilan keputusan dalam perencanaan dilaksanakan secara sistematis, rasional dengan menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan dan dapat dibenarkan secara ilmiah. Pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencapai tujuan dimasa mendatang. Pengambilan keputusan dalam perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan, baik tujuan umum atau tujuan khusus organisasi atau lembaga. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. “Begitu pentingnya sebuah perencanaan sehingga dikatakan apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan

dengan benar sesungguhnya sebagian besar pekerjaan telah selesai dilakukan” (Didin Kurniadin, 2013: 139)

2. Tipe-tipe Perencanaan

Menurut Friedman (1973) perencanaan alokatif dikategorikan dalam empat tipe (Sudjana, 2004: 66) :

a. Perencanaan berdasarkan Perintah (*Command Planning*)

Perencanaan berdasarkan perintah ditandai dengan ciri birokratik yang kuat. Perencanaan *Command Planning* berorientasi pada rencana umum yang telah disusun berdasarkan patokan-patokan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga tingkat atas yang memiliki wewenang memberikan perintah. Alat utama dalam perencanaan tipe ini adalah sanksi. Para perencana di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk menjabarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh lembaga tingkat atas. “Tipe perencanaan berdasarkan perintah sangat erat hubungannya dengan sistem pemerintahan yang terpusat (sentralisasi)” (Sudjana, 2004: 67).

Lembaga pemerintah di tingkat pusat menyusun rencana umum tingkat nasional sebagai bahan rujukan bagi rencana di lembaga-lembaga tingkat daerah. Rencana umum tingkat pusat berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional. Patokan perencanaan dan tolok ukur keberhasilan dalam perencanaan rencana ditetapkan oleh lembaga tingkat pusat. Berdasarkan rencana dan patokan perencanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga pusat, lembaga tingkat daerah menyusun rencana yang harus merujuk kepada rencana yang ditetapkan tingkat nasional. Semua rencana dan pelaksana di tingkat daerah berkewajiban untuk

mencapai target yang telah ditetapkan oleh tingkat pusat. Pengawasan oleh tingkat pusat dilakukan melalui inspeksi yang berimplikasi pada peringatan teguran, ancaman dan bahkan hukuman.

b. Perencanaan berdasarkan Kebijakan (*Policies Planning*)

Perencanaan tipe ini mendasar pada kebijakan-kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk terwujudnya proses pengambilan keputusan mengenai rencana yang merujuk kepada kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta lembaga penyelenggara program. Dengan demikian, kegiatan perencanaan berdasarkan kebijakan dilakukan melalui upaya memadukan berbagai kebijakan dengan kepentingan lembaga di tingkat pusat dan daerah (Sudjana, 2004: 69).

Perencanaan berdasarkan kebijakan hampir sama dengan perencanaan berdasarkan perintah, yaitu perencanaan di tingkat daerah dititikberatkan pada penjabaran kebijakan dari lembaga-lembaga di tingkat pusat. Akan tetapi, perencanaan tipe ini memberi kewenangan kepada lembaga di tingkat daerah untuk menjabarkan dan menyesuaikan kebijakan tingkat pusat dengan daerah masing-masing. Perencanaan tipe ini mengarah pada kepentingan dan kondisi daerah (desentralisasi). Secara sederhana perencanaan berdasarkan kebijakan berkaitan dengan upaya penjabaran kebijakan dari tingkat pusat dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing (Sudjana, 2004: 71)

c. Perencanaan berdasarkan Persekutuan (*Corporate Planning*)

Perencanaan berdasar persekutuan lebih menitikberatkan pada hubungan antar berbagai pihak baik dalam menentukan tujuan maupun dalam menetapkan

kegiatan untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tipe ini adalah lembaga-lembaga atau Organisasi swasta dan kemasyarakatan yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan lainnya. Cara yang biasa digunakan dalam kegiatan perencanaan adalah dengan saling mengajukan usul gagasan, pendapat dan alasan-alasan diantara pihak-pihak yang bekerjasama (Sudjana, 2004: 72).

Pada tipe perencanaan persekutuan pengambilan keputusan tidak dilakukan sebelum semua pihak menyepakati melalui proses perundingan dan hasil keputusan dalam perundingan diwarnai tawar menawar mengenai kepentingan masing-masing dan setiap pihak menggunakan kekuatan dan pengaruhnya. Dengan demikian proses kegiatan yang dilakukan antar dan oleh pihak yang bersekutu menjadi ciri utama tipe perencanaan ini.

d. Perencanaan berdasarkan Kepentingan Peserta

Perencanaan berdasarkan kepentingan peserta terjadi apabila proses pengambilan keputusan mengenai rencana untuk memecahkan masalah nasional atau untuk memecahkan masalah nasional ditawarkan atau diserahkan oleh lembaga tingkat nasional kepada lembaga yang dibentuk masyarakat (Sudjana, 2004: 76). Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dimaksud antara lain koperasi, himpunan petani, rukun tetangga, ikatan pelajar dan mahasiswa, organisasi pemuda dan wanita, persatuan keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.

Perencanaan tipe ini memiliki tiga ciri umum. Pertama wewenang untuk mengambil keputusan diserahkan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Kedua terjadi partisipasi aktif setiap peserta dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga pengawasan terhadap perencanaan dilakukan secara sukarela oleh masyarakat sendiri (Sudjana, 2004: 77). Secara umum lembaga swadaya masyarakat memiliki sumber dana yang terbatas karena sumbangan anggota atau penduduk yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga lembaga swadaya masyarakat berusaha mendapatkan bantuan dari pihak luar baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

3. Karakteristik Perencanaan

Perencanaan pendidikan non formal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (pamong, tutor, fasilitator, warga belajar, pimpinan lembaga, dan masyarakat) dan sumber daya non-manusia (fasilitas, alat-alat, waktu, biaya, alam). Salah satu ciri umum yang dapat dilihat dari perencanaan pendidikan adalah perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah kebutuhan, situasi, dan tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik (Udin Syaefudin & Abin Syamsuddin, 2005: 12)

Sudjana mengemukakan perencanaan dalam pendidikan non formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudjana, 2004: 59) :

- a. Pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.
- b. Berorientasi pada perubahan dari masa sekarang pada keadaan yang diinginkan dimasa datang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai.
- c. Melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.
- d. Memberikan arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu
- e. Melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau akan dilaksanakan, meliputi kebutuhan, kemungkinan keberhasilan, sumber-sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta kemungkinan resiko dari suatu tindakan yang akan dilakukan.
- f. Berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan. Prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi atau kepentingan, relevansi dengan kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi.
- g. Titik awal untuk arahan terhadap kegiatan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan.

4. Prinsip Perencanaan Pendidikan Non Formal

Perencanaan sebagai kegiatan menyusun serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan perlu memperhatikan beberapa prinsip yang ada. Perencanaan program pendidikan non formal perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudjana, 2004: 102) :

- a. Perencanaan atau penyusunan program non formal harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber-sumber dan karakteristik sasaran program.
- b. Perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun, sehingga kegiatan yang direncanakan berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya.
- c. Perencanaan program harus memanfaatkan sumber daya yang ada secara cermat dengan hasil seoptimal mungkin.
- d. Menyeluruh artinya dalam perencanaan pendidikan non formal perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program seperti masukan, proses keluaran dan dampak pendidikan non formal.

5. Tahapan Perencanaan Program

Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis, menghasilkan serangkaian tindakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana langkah-langkah dalam perencanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian (Sudjana, 2004: 102). Pada tahap persiapan meliputi kegiatan *need assessment* atau analisis kebutuhan. Tujuan dilakukannya identifikasi atau analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan program yang diinginkan masyarakat, mempermudah menyusun rencana program dan memperlancar pelaksanaan kegiatan (Sujarwo, 2007).

Analisis kebutuhan yang dilakukan mencakup berbagai aspek keberhasilan kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, harapan dan aspirasi masyarakat. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan saat proses identifikasi adalah berkonsultasi dengan pejabat

berwenang, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang dianggap membantu meminta pertimbangan dan persetujuan, menemukan data yang perlu dikumpulkan, melakukan teknik identifikasi, mempersiapkan sasaran di lapangan, menyiapkan instrumen pengumpulan data (Sudjana, 2004: 103).

Tahap pelaksanaan merupakan tahap mewujudkan rencana yang telah tertulis dalam *actions*. Pada tahap pelaksanaan inilah yang akan menentukan apakah suatu rencana itu baik dan efektif. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana. Mengevaluasi proses hasil dan dampak program pembelajaran.

C. Kajian tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Keberadaan pendidikan non formal berkaitan dengan keberadaan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tersebut adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di bawah Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota yang mengusung tugas pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, non formal dan informal di tingkat Kabupaten/Kota (Anonim, 2013).

Berbeda dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan sebuah lembaga pendidikan bentukan masyarakat, yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, SKB merupakan lembaga pemerintah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan non formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan

kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah. SK Mendikbud RI, Nomor 023/O/1997 menyebutkan bahwa tugas pokok SKB “Melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga”. Beberapa program pendidikan non formal yang umumnya dilaksanakan di SKB antara lain PAUD, program-program kecakapan hidup, serta program-program untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan non formal.

D. Kajian Model Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Secara umum kemitraan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Ambar Teguh, 2004: 129). Pengertian lainnya menurut Sentanoe Kertonegoro kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat (dalam Nana Rukmana, 2006: 60).

Kemitraan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam posisi sederajat yang menjalin suatu ikatan didasarkan atas dasar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian-pengertian di atas maka terdapat persyaratan tertentu yang

harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan (Ambar Teguh.2004: 130), yaitu :

- a. Ada dua pihak atau lebih
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- c. Ada kesepakatan
- d. Saling membutuhkan

Menjalin sebuah kemitraan hendaknya terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak-pihak yang menjalin kemitraan bukan sebaliknya saling merugikan antar pihak-pihak yang bermitra. “Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra” (Ambar Teguh, 2004: 130). Menjalin kemitraan sangat membutuhkan komitmen yang kuat dan seimbang antar pihak yang bermitra agar pihak yang bermitra dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang bermitra (Ambar Teguh, 2004: 130).

2. Prinsip Menjalin Kemitraan

“Dalam menjalin sebuah kemitraan ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra” (Nana Rukmana, 2006:63). Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan (Ditjen P2I & PM, dalam Kuswidanti, 2008) :

a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

b. Prinsip Keterbukaan

Organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c. Prinsip Azas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

3. Model-model Kemitraan

Kemitraan memiliki model-model yang umumnya diterapkan antar lembaga. Model-model kemitraan dibedakan menjadi tiga (Ambar Teguh, 2004: 130-131) yaitu :

a. Kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan serta disepakati (Ambar Teguh, 2004: 130). Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemitraan semu sebenarnya adalah kemitraan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, tetapi sebenarnya pihak yang bermitra tidak mengerti apa maksud kemitraan tersebut dan manfaat apa yang diperoleh dari kemitraan tersebut.

b. Kemitraan mutualistik

“Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal” (Ambar Teguh, 2004: 131). Dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang melakukan kemitraan mengetahui benar manfaat apa yang diperoleh dari menjalin sebuah kemitraan sehingga masing-masing dapat mewujudkan visi dan misi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Kemitraan melalui peleburan/konjugasi

Kemitraan konjugasi pada umumnya dilakukan oleh organisasi, agen-agen kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau tujuan organisasi (Ambar Teguh, 2004: 131). Organisasi/ kelompok/ perorangan yang melakukan kemitraan konjugasi sama-sama membutuhkan untuk

mengatasi kelemahan yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup (Ambar Teguh, 2004: 131) :

a. Subordinate Union of Partnership

Fenomena kemitraan seperti ini terjadi antara dua pihak atau lebih memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Hubungan yang tercipta dalam kemitraan ini tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang, melainkan pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah (Ambar Teguh, 2004: 131). Kemitraan dengan model ini menciptakan hubungan kemitraan yang terlihat seperti atasan dan bawahan. Lembaga yang lebih kuat berada di atas sedangkan lembaga yang lemah berada di bawah, sehingga tidak ada peran yang seimbang.

b. Linear Union of Partnership

Kemitraan linear union of partnership merupakan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi atau para pihak yang memiliki kesamaan secara relative. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi status dan legalitas (Ambar Teguh, 2004: 132). Kemitraan tipe ini, organisasi atau pihak yang bermitra menciptakan hubungan yang sejajar atau seimbang, sehingga pihak-pihak yang bermitra dapat melakukan *sharing* dan memiliki peran atau fungsi yang seimbang.

c. Linear collaborative of partnership

Kemitraan seperti ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra. Kemitraan lebih menekankan pada visi misi yang saling mengisi satu dengan lainnya (Ambar Teguh, 2004: 132).

E. Kajian tentang Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi (*Participation*) merupakan peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi juga dapat diartikan pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut serta terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan bahan dan jasa (Fasli jalal & Dedi Supriadi, 2001: 201-202). Pengertian lain, partisipasi diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya (Siti Irine, 2011: 51). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran atau pendapat, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua macam (Euis Sunarti, 2012) :

1. Partisipasi langsung

Partisipasi secara langsung merupakan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi, misalnya dalam kegiatan pertemuan, diskusi, untuk mengajukan ide, pandangan atau pendapat

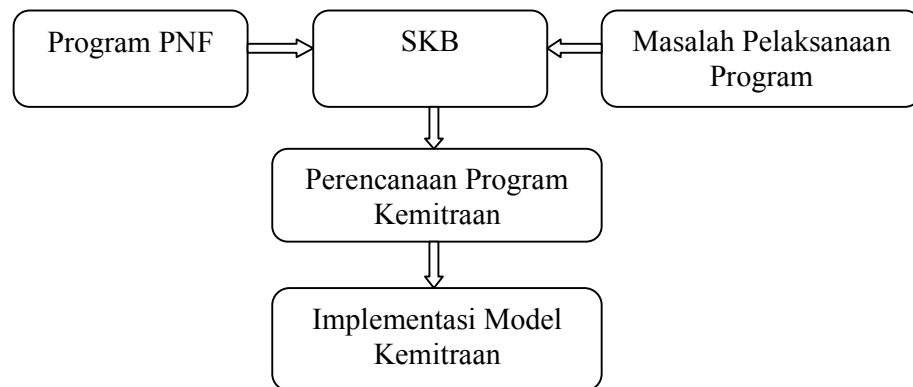
2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung merupakan keikutsertaan seseorang yang mewakili hak partisipasinya (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan) ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada tingkat yang lebih tinggi.

F. Kerangka Pikir

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program-program pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat. UPT SKB Gunungkidul perlu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, UPT SKB Gunungkidul mengalami kendala seperti permasalahan dana, fasilitas dan SDM yang terbatas. Agar dapat mengatasi kendala yang dialami, UPT SKB Gunungkidul memerlukan perencanaan program kemitraan untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui implementasi model kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi UPT SKB

Gunungkidul sehingga program yang dilaksanakan dan dikembangkan dapat berjalan lebih optimal.



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan untuk memudahkan pengumpulan data dan informasi mengenai aspek yang akan diteliti, maka pertanyaan penelitian merinci pada :

1. Bagaimana latar belakang kemitraan UPT SKB Gunungkidul?
2. Siapa saja yang berpartisipasi dalam perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?
3. Bagaimana tahapan perencanaan program kemitraan yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul?
4. Bagaimana model kemitraan yang diimplementasikan UPT SKB Gunungkidul?
5. Bagaimana mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul?
6. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kemitraan lembaga?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sifat data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui Model kemitraan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005: 6).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berupa kata-kata dan bahasa dan tidak menggunakan angka-angka. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan bagaimana Pengembangan program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui Model Kemitraan

B. *Setting* Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di SKB Gunungkidul, Jl.Pemuda, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Adapun faktor-faktor sebagai pertimbangan dalam pemilihan tempat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta

2. Belum ada penelitian tentang kemitraan di SKB Gunungkidul

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data (informan) dalam penelitian kualitatif bias berupa orang, kegiatan, dan atau dokumentasi (arsip). Subyek penelitian diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai informasi-informasi atau data-data yang menjadi sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala UPT SKB Gunungkidul
2. Pamong UPT SKB Gunungkidul
3. Staff bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Gunungkidul
4. Pengelola PKBM Sembada, lembaga mitra UPT SKB Gunungkidul

Faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan subjek penelitian ini karena subjek penelitian tersebut mengetahui informasi yang berkaitan dengan kemitraan SKB Gunungkidul. Pemilihan subyek ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas itu (Moleong, 2005: 186).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Keutamaan teknik wawancara adalah dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam kemitraan dengan SKB Gunungkidul. Peneliti sebagai pewawancara akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang diwawancarai yaitu Kepala lembaga, pamong, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta PKBM sebagai lembaga mitra UPT SKB Gunungkidul.

Tabel. 1
Teknik Pengumpulan Data

No	Aspek	Sumber Data	Teknik
1.	Latar Belakang Kemitraan	Kepala lembaga, dan pamong	wawancara
2.	Partisipasi perencanaan program	Kepala lembaga, pamong, staff Dinas pendidikan pemuda dan olahraga, pengelola PKBM.	Wawancara,
3.	Tahapan perencanaan	Kepala lembaga dan pamong	wawancara
4.	Model Kemitraan	Kepala lembaga, pamong, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, pengelola lembaga mitra	wawancara
5.	Mekanisme kemitraan	Kepala lembaga dan pamong	wawancara
6.	Faktor pendukung dan penghambat kemitraan	Kepala lembaga, pamong, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, pengelola lembaga mitra	wawancara

E. Instrumen Penelitian

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2007: 148). Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri atau

anggota tim peneliti (Sugiyono, 2010: 145). Peneliti merupakan alat peneliti utama dalam pengumpulan data. Peneliti juga dibantu oleh pengumpul data yang lain seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan alat tulis lainnya (Moleong, 2005: 169-170).

F. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, artinya data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilaporkan apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dari wawancara dengan responden dan observasi yang kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan dari jawaban yang diperoleh. Ada pun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan meliputi :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak oleh karena itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Peneliti perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari polanya.

2. Display data

Data yang diperoleh di lapangan berupa uraian deskriptif yang panjang dan sukar dipahami disajikan secara sederhana, lengkap, jelas, dan singkat tapi

memenuhi kebutuhan data penelitian dan memudahkan peneliti dalam memahami gambaran dan hubungannya terhadap aspek-aspek yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan dimana peneliti harus memaknai data yang terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan singkat yang mudah dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti. Data tersebut dibandingkan dan dihubungkan dengan yang lainnya, sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Analisis data dilakukan dalam proses pengamatan dan wawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis yang merinci data yang diperoleh lebih lanjut kemudian mengorganisasikannya. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan pengamatan terfokus dan wawancara terkait dengan fokus penelitian yaitu Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Melalui Model Kemitraan. Tahap berikutnya dilakukan analisis dengan cara pengorganisasian hasil temuan data wawancara yang diperoleh. Tahap selanjutnya dilakukan dengan analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna yang menjadi focus penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010: 125). Secara umum tujuan dari triangulasi data ini adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-

temuan lapangan benar-benar representatif. Teknik triangulasi sumber data adalah peneliti mengutamakan check-recheck, cross-recheck antar sumber informasi satu dengan lainnya (Moleong, 2000: 178).

Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan mengecek informasi data hasil yang diperoleh dari:

1. Wawancara
2. Membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala lembaga SKB Gunungkidul, pamong, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan pengelola PKBM yang berkaitan dengan kemitraan.

Dengan demikian tujuan dari triangulasi ini adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama dengan sumber yang berbeda, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subyektivitas dari peneliti serta mengroscek data di luar subyek.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Dasar pertimbangan bahwa untuk memperoleh satu informasi dari satu respon den perlu diadakan crsoss chek antara informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga informasi yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya (*valid*). Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang betul-betul mengetahui permasalahan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul berawal dari Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) yang berdiri pada tahun 1974 di bawah Bidang Pendidikan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 1978 PLPM berubah menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul. Berdasarkan keputusan Bupati Gunungkidul nomor 184/kpts/2001 SKB menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) SKB Gunungkidul di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. SKB Gunungkidul memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan dan membuat percontohan program kesetaraan dan kursus institusional (Peraturan Bupati No.131 tahun 2008, pasal 3).

1. Profil Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul

Nama lembaga : UPT sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul
Alamat : Jl.Pemuda No.21, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul
No telp : 0273919191
Akte notaries : Keputusan Bupati No. 184/KPTS/2001
NPWP : 00.015.184.5.542.000
Email : skb_gunungkidul@yahoo.com
Website : www.skb-gunungkidul.com

2. Visi dan Misi SKB Gunungkidul

Visi dan Misi SKB Gunungkidul merupakan sikap kerja yang ditanamkan oleh kepala dan karyawan UPT SKB Gunungkidul sebagai upaya mewujudkan visi SKB Gunungkidul agar menjadi lembaga yang berkualitas.

a. Visi SKB Gunungkidul.

Pengembangan pusat data, percontohan program Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Informal (PNFI).

b. Misi SKB Gunungkidul :

- 1) Wewujudkan pusat data Pendidikan Non Formal Informal.
- 2) Melaksanakan percontohan Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang berkualitas.
- 3) Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kursus Institusional.
- 4) Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Non Formal Informal.
- 5) Melaksanakan Pengembangan Model Pendidikan Non Formal dan Informal.

3. Tugas Pokok UPT (Unit Pelaksana Teknis) SKB Gunungkidul :

Menurut Peraturan Bupati No 131 tahun 2008, Pasal 3, tugas pokok UPT SKB Gunungkidul adalah melaksanakan penyelenggaraan dan membuat percontohan program kesetaraan dan kursus institusional.

4. Fungsi UPT SKB Gunung kidul :

Paraturan Bupati No.131 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa Fungsi UPT SKB Gunungkidul adalah :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT
- b. Penyusunan kebijakan teknis UPT

- c. Pelaksanaan pelayanan pendidikan kesetaraan dan kursus Institusional
- d. Pembinaan dan pelayanan pendidik kesetaraan dan kursus institusional
- e. Pengelolaan ketatausahaan UPT SKB
- f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penyelenggaraan dan pembuatan percontohan program pendidikan kesetaraan dan kursus institusional dan,
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT SKB.

5. Keadaan Pegawai

Secara keseluruhan pegawai UPT SKB Gunungkidul berjumlah enam belas orang, yang terdiri dari Kepala UPT SKB, pamong belajar yang berjumlah tujuh orang dan delapan orang tata usaha. Setiap pamong di UPT SKB Gunungkidul memiliki tanggung jawab terhadap program-program UPT SKB Gunungkidul dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pokja Keaksaraan, Pokja *Life Skill*, Pokja PAUD, Pokja Kesetaraan, dan Pokja TBM. Dari seluruh pamong UPT SKB Gunungkidul, salah seorang pamong kurang aktif dalam kegiatan UPT SKB Gunungkidul dikarenakan sakit dan pamong tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kepala UPT SKB Gunungkidul untuk izin pada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengobatan. Pada saat peneliti melakukan penelitian UPT SKB Gunungkidul memiliki Kepala UPT SKB yang baru menggantikan Kepala UPT SKB yang memasuki masa pensiun.

6. Fasilitas UPT SKB Gunungkidul

UPT SKB Gunungkidul memiliki gedung perkantoran, gedung pembelajaran, asrama, aula, masjid dan fasilitas olahraga. UPT SKB memiliki

ruang komputer dengan 8 komputer, akan tetapi tidak semua komputer dapat digunakan karena beberapa di antaranya telah rusak dan belum diperbaiki. UPT SKB Gunungkidul juga memiliki TBM mobile dengan fasilitas satu unit mobil keliling dengan perkiraan jumlah buku 2000 judul buku, akan tetapi mobil tersebut jarang sekali dioperasikan karena tidak ada tenaga untuk mengoperasikannya. UPT SKB Gunungkidul memiliki pendopo yang biasanya digunakan untuk ruang pertemuan dengan kapasitas kurang lebih 150 orang. UPT SKB Gunungkidul juga memiliki perpustakaan dengan berbagai judul buku serta lapangan olahraga seluas 30x50 meter yang biasanya digunakan untuk olahraga para karyawan UPT SKB Gunungkidul seperti voli, basket maupun tenis.

7. Program-program UPT SKB Gunungkidul

Pada tahun 2013 UPT SKB Gunungkidul merencanakan beberapa program. Berikut ini program UPT SKB Gunungkidul :

Tabel 2 : Program UPT SKB Gunungkidul

Nama Program	Tujuan
Pendidikan Kecakapan Hidup	Memberikan keterampilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan butuh keterampilan
Pembelajaran Tenaga Pendidik Nonformal	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kependidikan non formal
Pengembangan Data, Informasi, pendidikan Non formal	Mengetahui data PNFI se Kabupaten Gunungkidul
Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar	Terselenggaranya pengembangan kurikulum dan bahan ajar serta model pembelajaran PNFI

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perencanaan Program Kemitraan Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul

a. Latar belakang kemitraan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul

UPT SKB Gunungkidul sebagai lembaga pendidikan non formal ikut berperan serta dalam penyelenggaraan beberapa program pendidikan non formal di Kabupaten Gunungkidul. UPT SKB Gunungkidul menyelenggarakan program dengan kerjasama atau menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Hal tersebut karena keterbatasan yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul terutama dalam hal sumber daya seperti dana, fasilitas, maupun narasumber seperti yang diungkapkan oleh “KU” (W.1.1) yang merupakan Kepala UPT SKB Gunungkidul :

“Alasannya sumber daya SKB ini kan terbatas, sedangkan untuk bisa melaksanakan program SKB kan butuh fasilitas, dana, narasumber. Hampir semua program yang Kami selenggarakan bermitra dengan lembaga lain Mba, karena SKB kan punya keterbatasan. SKB punya pamong yang dapat merancang program, tapi Dana, fasilitas, narasumber, hal-hal seperti itu yang menjadi kendala Kami, jadi kami membutuhkan pihak lain untuk mengatasi kendala tersebut. SKB memang punya fasilitas tetapi kan tidak lengkap misalnya untuk kursus potong rambut, SKB tidak punya peralatan potong rambut makanya SKB bekerja sama dengan lembaga lain, pamong di SKB juga tidak ada yang bisa potong rambut, makanya butuh narasumber dari luar. Jadi ya itulah mengapa SKB butuh kerjasama dengan lembaga lain karena sumber daya di SKB ini terbatas.”

Selain keterbatasan sumber daya seperti dana, fasilitas maupun narasumber ada beberapa alasan lainnya yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul seperti yang diungkapkan oleh “Hj” (W 1.2), pamong UPT SKB Gunungkidul :

“Ada beberapa alasan mengapa SKB melakukan kemitraan, pertama memang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. SKB tidak mungkin melakukan program secara mandiri karena sumber daya yang dimiliki SKB itu terbatas. Kedua untuk menjaga mutu program termasuk mutu output program. Ketiga penyaluran lulusan program. Para lulusan program kecakapan hidup sebagian disalurkan ke berbagai tempat seperti salon, rias pengantin, penjahit, meskipun tidak semuanya karena ada juga lulusan kursus yang memilih membuka usaha sendiri. Itu juga bagian dari kemitraan yang dilakukan SKB.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “SB” (W.1.3) yang juga pamong UPT SKB Gunungkidul :

“Alasan utamanya masalah sumber daya ya Mba, karena program SKB kan butuh dana besar, fasilitas, yang tidak semuanya dimiliki SKB, makanya SKB butuh mitra, selain itu SKB juga membutuhkan mitra untuk penyaluran lulusan Mba. Lulusan kursus ada yang magang ditempat usaha seperti salon atau rias pengantin Mba, jadi nantinya keterampilan mereka dapat terasah dan dapat pengalaman kerja juga. Biasanya Mba, yang punya salon atau rias itu senang Mba, jika ada lulusan SKB yang magang di tempat mereka.”

Program yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul umumnya kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung dan mengatasi kendala terutama dana, fasilitas, dan narasumber yang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan program seperti yang diungkapkan oleh “Rt” (W.1.4) :

“Karena sumber daya yang dimiliki SKB terbatas Mba. Dari dana terbatas, fasilitas terbatas, terus untuk narasumber misalnya SKB harus mendatangkan orang lain di luar SKB. Program-program yang dilaksanakan SKB umumnya kerjasama dengan lembaga lain. Kami memerlukan dukungan karena dalam membuat program banyak yang dibutuhkan, dari mulai dana, fasilitas, narasumber. Dengan kerjasama dengan lembaga lain, paling tidak permasalahan tadi dapat diatasi.”

Selain dari pernyataan yang diungkapkan oleh “KU, Hj, SB dan Rt peneliti juga melakukan pengamatan mengenai fasilitas UPT SKB Gunungkidul. Dari hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa fasilitas UPT SKB Gunungkidul memang kurang lengkap dan kondisinya yang

kurang memadai untuk digunakan, seperti komputer untuk pembelajaran sebagian besar rusak dan mati, peralatan untuk program kecakapan hidup yang kurang memadai, bahkan peralatan yang dibutuhkan untuk beberapa program kecakapan hidup tidak dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi latarbelakang kemitraan yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain. Alasan tersebut antara lain :

- 1) Kebutuhan dana, fasilitas maupun SDM berupa narasumber teknis atau tutor untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan.
- 2) UPT SKB Gunungkidul berusaha menjaga mutu program yang diselenggarakan khususnya mutu output program.
- 3) Menyalurkan lulusan program kecakapan hidup ke berbagai tempat sesuai bidang yang dibutuhkan.

Program UPT SKB Gunungkidul membutuhkan sumber daya seperti dana, fasilitas dan SDM agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. Dengan keterbatasan dana, fasilitas dan SDM yang dimiliki, tidak memungkinkan bagi UPT SKB Gunungkidul merencanakan programnya secara mandiri, oleh karena itu UPT SKB Gunungkidul membutuhkan lembaga atau pihak lain, agar kebutuhan dana, fasilitas dan SDM dapat terpenuhi dan program dapat dilaksanakan dengan optimal.

UPT SKB Gunungkidul menjalin kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain pada kegiatan perencanaan program, dalam rangka memenuhi

kebutuhan dana, fasilitas dan SDM agar dapat melaksanakan program dengan optimal. Selain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, kemitraan juga dibutuhkan untuk menjaga mutu program serta untuk menyalurkan lulusan program. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas suatu bidang tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Ambar Teguh, 2004: 129)

b. Partisipasi dalam perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul

Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan program yang akan dilaksanakan. Selain dari pihak UPT SKB Gunungkidul perencanaan juga melibatkan pihak di luar lembaga. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh “KU” (W.2.1), Kepala UPT SKB Gunungkidul :

“ SKB kan di bawah Dinas, jadi dari Dinas dilibatkan juga. Selain dari Dinas, SKB melihat program apa yang akan dilaksanakan, intinya keterlibatan pihak luar disesuaikan dengan program apa yang akan dilaksanakan. Kalau lingkup SKB sendiri ada kepala SKB, TU, pamong, untuk yang di luar SKB biasanya ada Dinas. Selain itu SKB juga menjalin mitra dengan lembaga lain, ada forum-forum seperti Forum tutor, Forum PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi, LKP, tapi untuk yang selain Dinas seperti tadi yang sudah saya katakan keterlibatan pihak di luar SKB disesuaikan. Kalau masyarakat keterlibatannya dengan memberikan usulan program kepada pamong, kemudian usulan masyarakat itu kami tampung untuk diajukan dalam rapat perencanaan program, nanti usulan tersebut bisa dilaksanakan atau bisa juga tidak.”

UPT SKB Gunungkidul melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul serta lembaga lain yang terkait langsung dengan program yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan sumber daya yang diperlukan, sehingga program yang direncanakan dapat dilaksanakan. Seperti pernyataan juga diungkapkan “Hj” (W.2.2) :

“Umumnya ada pihak di luar SKB yang terlibat dalam perencanaan program di SKB, ini terkait dengan sumber daya yang nantinya diperlukan dalam setiap program. Selain dari SKB tentu Dinas juga dilibatkan dalam perencanaan program karena program yang nanti akan dilaksanakan harus melalui persetujuan Dinas. Kalau dari pihak SKB ada kepala UPT SKB, Kasubag TU, pamong, kalau dari pihak luar Dinas misalnya ada Koordinator Penilik, Kasi PAUD dan Kasi PLS, juga ada forum-forum seperti Forum tutor, PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi dan LKP jika untuk program kursus. Tapi itu juga tergantung program apa yang nantinya akan dilaksanakan, yang pasti disesuaikan.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “SB” (W.2.3), Pamong UPT SKB Gunungkidul :

“Perencanaan program di SKB umumnya melibatkan beberapa pihak, tergantung program apa yang akan dilaksanakan, semakin besar programnya maka yang dilibatkan akan lebih banyak, karena kebutuhannya juga pasti lebih banyak, tergantung program yang akan dilaksanakan Mba. Pihak SKB sendiri yang biasanya terlibat dalam perencanaan program itu ada Kepala SKB, TU, Pamong, kalau dari luar ada Dikpora Gunungkidul. Kebutuhan setiap program berbeda, jadi yang terlibat juga berbeda. SKB kan juga bekerja sama dengan pihak lain selain Dinas, ada berbagai forum, HIMPAUDI juga ada, PKBM, LKP, nah itu juga dilibatkan.”

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai lembaga yang membawahi UPT SKB Gunungkidul juga mengungkapkan keterlibatannya dalam perencanaan program UPT SKB Gunungkidul, seperti

yang diungkapkan oleh “Id” (W.2.5) sebagai staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul :

“Dinas memang terlibat Mba dalam perencanaan program SKB karena program yang dilaksanakan SKB perlu mendapatkan persetujuan dari Dinas sebagai pembuat kebijakan. Dana untuk program SKB memang kebanyakan dari APBD Mba, jadi ada anggaran dari Dinas untuk SKB Mba. Tidak semua usulan program SKB bisa kami terima karena anggaran dananya memang terbatas, jadi programnya harus menyesuaikan anggaran yang tersedia, tidak semuanya bisa dilaksanakan. Dinas juga bisa memberikan masukan program pada SKB, jadi Dinas meminta programnya untuk dilaksanakan oleh SKB dengan pertimbangan SKB kan punya pamong yang bisa merancang program, tapi untuk dana, fasilitas dan sebagainya Dinas membantu menyediakan.”

Pernyataan di atas diperjelas oleh “Nn” (W.2.6) yang juga staff Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul :

“Dinas juga dilibatkan dalam perencanaan program SKB Mba, karena bagaimanapun Dinas sebagai pembuat kebijakan. Dinas perlu memberikan persetujuannya untuk program yang akan dilaksanakan oleh SKB atau bisa juga Dinas memberikan masukan program pada SKB. SKB memerlukan persetujuan dari Dinas untuk program-programnya karena sebagian besar dana untuk program berasal dari Dinas. Antara Dinas dan SKB saling *sharing* untuk program apa yang sebaiknya dilaksanakan dan tidak karena anggarannya kan juga terbatas, jadi tidak semua usulan dari SKB bisa kami terima karena harus menyesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Pengambilan keputusan prioritas program hanya dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Sedangkan lembaga selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, umumnya hanya dilibatkan dalam hal-hal yang bersifat teknis, seperti yang diungkapkan oleh “St” (W.2.7) pengelola PKBM Sembada :

“Tidak selalu Mba, Kalau misalnya programnya untuk meningkatkan kompetensi tutor PKBM, ya kami ikut dilibatkan, biasanya untuk masalah teknis, seperti sosialisasi program Mba.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan program kemitraan UPT Gunungkidul melibatkan pihak dari UPT SKB Gunungkidul sendiri yang terdiri dari Kepala UPT SKB Gunungkidul, pamong dan Tata Usaha, serta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan.

Teori perencanaan pendidikan non formal menyebutkan bahwa perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan (Sudjana, 2004: 59). Dari hasil penelitian, perencanaan program UPT SKB Gunungkidul melibatkan pihak dari UPT SKB Gunungkidul maupun dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Penentuan prioritas program dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara pihak UPT SKB Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul.

Perencanaan program UPT SKB Gunungkidul melibatkan partisipasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang ditunjukkan berupa keterlibatan dengan memberikan ide atau masukan program, maupun dapat dilakukan dalam bentuk nyata yaitu berupa dana, maupun fasilitas. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu keahlian modal dan materi serta

ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan program UPT SKB Gunungkidul dilakukan secara langsung dengan memberikan masukan, ide, maupun dalam bentuk dana dan fasilitas. Partisipasi secara langsung merupakan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi, misalnya dalam kegiatan pertemuan, diskusi, untuk mengajukan ide, pandangan atau pendapat (Euis Sunarti, 2012).

c. Tahapan perencanaan program kemitraaan UPT SKB Gunungkidul

UPT SKB Gunungkidul merencanakan program rutin setiap tahunnya. Perencanaan disusun berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pamong UPT SKB Gunungkidul maupun masukan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, seperti yang diungkapkan oleh “KU” (W.3.1) Kepala UPT SKB Gunungkidul :

“Memang SKB selalu ada program yang direncanakan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil identifikasi yang kami lakukan ditambah dengan masukan dari Dinas ada empat program, ada Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, kemudian program Kecakapan Hidup atau kursus dan ada program Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal yang kegiatannya berupa diklat-diklat seperti itu Mba.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “Rt” (W.3.4) :

“Program rutin SKB ada program Kecakapan Hidup atau kursus, Pembelajaran Tenaga Pendidikan Non Formal biasanya dalam bentuk Diklat. Diklat memang biasanya diadakan tiap tahun Mba, tapi sasarannya berbeda, misalnya jika tahun kemarin diklatnya sasarannya adalah pendidik PAUD, untuk tahun ini diklatnya untuk para tutor PKBM, jadi memang ada pergantian tiap tahunnya. Kemudian ada Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, dan ada pengembangan kurikulum bahan ajar.”

Salah program rutin yang dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul adalah program kecakapan hidup. Berbagai macam kursus yang dilaksanakan di UPT SKB Gunungkidul untuk memberikan berbagai macam keterampilan yang nantinya akan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja atau membuka usaha. Masyarakat juga berpartisipasi memberikan usulan dengan mendatangi UPT SKB Gunungkidul untuk bertanya, atau mendaftar berbagai program kecakapan hidup yang akan dilaksanakan setiap tahun, seperti yang diungkapkan “Hj” (W.3.2) pamong UPT SKB Gunungkidul :

“...Untuk pendidikan kecakapan hidup Kami mendasar pada kebutuhan masyarakat. Melihat kondisi sebagian besar masyarakat yang memiliki perekonomian pas-pasan atau menengah ke bawah masyarakat membutuhkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha. Kursus itu tiap tahunnya banyak peminatnya, banyak masyarakat yang datang ke SKB untuk bertanya ke SKB kursus apa saja yang dilaksanakan SKB. Ada juga masyarakat yang mengusulkan agar SKB mengadakan kursus tertentu, misalnya kursus vokal. Meskipun dilaksanakan tiap tahun jumlah kursus yang dilaksanakan di SKB bisa berbeda setiap tahunnya, karena SKB merencanakan bersama Dinas jadi yang bisa dilaksanakan yang disetujui oleh Dinas yang sesuai dengan dana dan fasilitas yang ada...”.

Selain Program pendidikan kecakapan hidup, program diklat untuk pembelajaran pendidik non formal juga menjadi program yang rutin direncanakan oleh UPT SKB Gunungkidul bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, seperti yang diungkapkan oleh “ SB” (W. 3.3) :

“Tahun ini SKB ada empat program, dan itu program rutin ada Pengembangan data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal atau program Diklat. Diklat diadakan setiap tahun, itu untuk memberikan kompetensi yang lebih baik untuk para PTK Non formal, karena kan tingkat pendidikan

PTK itu kan bermacam macam, ada yang sudah lulusan S1 ada yang belum, jadi SKB bersama Dinas merasa perlu untuk merencanakan program yang dapat meningkatkan kompetensi PTK non formal melalui Pembelajaran Tenaga Pendidik non Formal tersebut...”.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa UPT SKB Gunungkidul merencanakan empat program yang rutin setiap tahunnya yaitu Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal. Perencanaan program dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 2004: 57). Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul berkaitan dengan pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan lembaga untuk menyusun prioritas program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan prioritas program dilakukan bersama antara UPT SKB Gunungkidul dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pembuat kebijakan, berdasarkan kebutuhan masyarakat.

UPT SKB Gunungkidul merencanakan program yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program kecakapan hidup atau kursus direncanakan oleh UPT SKB Gunungkidul berdasarkan hasil identifikasi yang melihat sebagian besar masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah sehingga membutuhkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha. Selain itu minat masyarakat mengikuti

kursus masih cukup banyak. Sedangkan program diklat pembelajaran pendidik non formal perlu untuk direncanakan dan dilaksanakan agar para tutor memiliki kompetensi yang lebih baik untuk dapat melakukan pembelajaran. “Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas yang ditetapkan berdasarkan relevansi dengan kebutuhan, sumber-sumber yang tersedia tujuan yang akan dicapai dan hambatan yang mungkin dihadapi” (Sudjana, 2004: 60).

Program UPT SKB Gunungkidul disusun dengan tujuan memberikan kesempatan pada masyarakat Gunungkidul untuk mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan khususnya pada jalur pendidikan non formal melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh “ KU”(W.4.1) :

“ SKB ingin memberikan masyarakat kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Kami merencanakan Program kecakapan hidup atau kursus agar masyarakat Gunungkidul memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau membuka usaha sehingga mereka dapat hidup dengan penghasilan yang lebih baik. Begitu juga program Pembelajaran Pendidik Non Formal yang tujuannya memberikan kompetensi yang lebih baik bagi para pendidik non formal atau tutor supaya mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan warga belajarnya.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “Hj” (W.4.2) pamong UPT SKB Gunungkidul :

“Tujuannya agar masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal, atau masyarakat yang *drop out* sekolah memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam hal ini pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat mereka. Dengan pengetahuan maupun keterampilan yang mereka dapatkan melalui pendidikan ini, nantinya dapat mereka manfaatkan untuk memberdayakan diri sendiri, keluarga maupun memberdayakan lingkungan mereka.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan oleh “SB” (W.4. 3) :

“Dengan program-programnya SKB ingin bisa memberikan masyarakat kesempatan belajar, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka bisa memperoleh keterampilan dan ilmu yang bisa digunakan untuk bekerja, atau bisa juga berwirausaha sehingga masyarakat lebih produktif, mapan secara ekonomi dan minimal bisa memberdayakan dirinya sendiri.”

Dari pernyataan- pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan SKB Gunungkidul merencanakan program kemitraan adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat khususnya di Gunungkidul untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan, yang nantinya dapat digunakan secara produktif untuk bekerja maupun membuka usaha sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

Tujuan yang hendak dicapai merupakan unsur yang penting dalam perencanaan program. Hal tersebut karena perencanaan pendidikan terkait dengan pembangunan pendidikan yang tujuannya mencapai tujuan yang dicita-citakan (Didin kurniadin, 2012: 141). Program UPT SKB Gunungkidul khususnya program kecakapan hidup disusun dengan tujuan agar masyarakat Gunungkidul memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan khususnya melalui pendidikan non formal agar dapat memberdayakan diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Tujuan lainnya yang ingin dicapai UPT SKB Gunungkidul melalui program pembelajaran pendidik non formal adalah memberikan kompetensi yang lebih baik bagi para pendidik non formal atau tutor sehingga diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan warga belajarnya. Program tersebut

sebagai upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal Informal (PNFI).

Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yang dilakukan melalui identifikasi masalah di lapangan oleh para pamong dan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh “ KU” (W 5.), Kepala UPT SKB Gunungkidul :

“ Proses penyusunan rencana program SKB tentu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Mba, makanya SKB melalui pamong melakukan identifikasi kebutuhan, dari kegiatan tersebut kan diketahui kira-kira apa yang masyarakat butuhkan, kemudian dari identifikasi kebutuhan itu SKB bersama Dinas menyusun atau merencanakan program untuk menjawab kebutuhan mereka. Karena SKB ada di bawah Dinas, jadi perencanaan program SKB perlu melibatkan Dinas untuk mendapatkan persetujuan maupun masukan dari Dinas. Dalam rapat antara Dinas dan SKB nanti akan ada keputusan kira-kira program apa saja yang menjadi bisa dilaksanakan dan tidak, karena tidak semua program yang diusulkan itu dapat diterima, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya yang ada. Agar kualitas program SKB semakin baik, program SKB selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, juga selalu mempertimbangkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh “ Hj” (W.5.2) :

“Untuk prosesnya pihak SKB (Pamong belajar) melakukan identifikasi kebutuhan, kira-kira program apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat, bisa mendengarkan masukan masyarakat langsung ataupun dengan mengumpulkan data-data seperti data jumlah *drop out* sekolah jumlah pengangguran, jumlah dan tingkat pendidikan tutor dan sebagainya. Selain itu karena SKB ini berada di bawah Dinas Gunungkidul, SKB mendengarkan juga masukan dan perlu persetujuan dari Dinas. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan masukan dari Dinas dalam RaKor (Rapat Koordinasi) disusun prioritas program yang dalam satu tahun akan dilaksanakan”.

Dari pernyataan- pernyataan di atas peneliti dapat menjelaskan tahapan perencanaan program UPT SKB Gunungkidul bersama dengan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan dan mitra UPT SKB Gunungkidul :

- 1) UPT SKB (Pamong belajar) melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan. Identifikasi kebutuhan di lapangan dilakukan dengan mendengarkan masukan masyarakat ataupun dengan mengumpulkan berbagai data misalnya data jumlah buta aksara Kabupaten Gunungkidul, data jumlah *drop out* sekolah Kabupaten Gunungkidul, jumlah pengangguran Kabupaten Gunungkidul, jumlah dan tingkat pendidikan tutor PKBM Kabupaten Gunungkidul jumlah dan tingkat pendidikan pendidik PAUD Kabupaten Gunungkidul dan sebagainya.
- 2) Sebelum memutuskan prioritas program UPT SKB Gunungkidul terlebih dahulu mendengarkan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul.
- 3) Mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul untuk memutuskan prioritas program yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, situasi, dan sumber daya yang tersedia. Setiap program yang direncanakan juga selalu mempertimbangkan pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Penjelasan mengenai tahapan perencanaan program yang dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul menunjukkan perencanaan program UPT SKB Gunungkidul dilakukan secara rasional berdasarkan hasil identifikasi para pamong serta masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Teori perencanaan pendidikan non formal menyebutkan bahwa

ciri lain dari perencanaan adalah pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan (Sudjana, 2004 : 59)

Pada proses perencanaan program, identifikasi kebutuhan merupakan tahapan pertama yang penting dilakukan. Tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan program yang diinginkan masyarakat, mempermudah menyusun rencana program dan memperlancar pelaksanaan kegiatan (Sujarwo, 2007). Kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan mendengarkan masukan masyarakat, berkonsultasi dan mendengarkan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pihak yang dianggap penting untuk meminta persetujuan. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan pada saat identifikasi kebutuhan adalah dengan konsultasi dengan pejabat berwenang, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang dianggap membantu meminta pertimbangan dan persetujuan, menemukan data yang perlu dikumpulkan, mempersiapkan sasaran di lapangan (Sudjana, 2004: 103).

Secara prinsip penyusunan program non formal harus berdasarkan kebijakan dan kebutuhan apa/siapa yang ingin dipenuhi. Hal ini berarti bahwa penyusunan program non formal harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber dan karakteristik sasaran program (Sudjana, 2004: 102). Kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul dengan mengumpulkan berbagai data, mendengarkan masukan

masyarakat, berkonsultasi dan mendengarkan masukan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Gunungkidul menunjukkan bahwa perencanaan program di lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip yang ada pada perencanaan program non formal.

Setiap rencana program UPT SKB Gunungkidul selalu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Karena keterbatasan sumber daya khususnya dana maka tidak semua program yang diajukan oleh pamong disetujui dan diterima oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Penentuan prioritas program yang dilakukan bersama antara UPT SKB Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia baik yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maupun sumber daya yang dimiliki masyarakat. Seperti yang diungkapkan “SB” (W.5.3) pamong UPT SKB Gunungkidul :

“...Tidak semua program yang diajukan SKB itu disetujui Mba, karena dananya juga terbatas. Selain itu juga mempertimbangkan sumber daya lain yang dibutuhkan, yang sekiranya bisa dipenuhi baik oleh SKB, Dinas maupun masyarakat. Karena itu perlu rapat koordinasi dulu antara pihak SKB dengan Dinas, itu yang nantinya menentukan program apa saja yang diprioritaskan, yang sekiranya relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dana dan sumber daya lain yang tersedia.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan oleh “Rt” (W.5.4) :

“....Usulan program harus mendapat persetujuan Dinas karena bagaimanapun dukungan sumber daya khususnya dana yang nantinya akan dipakai untuk program-program dari Dinas Mba. SKB dan Dinas melakukan rapat untuk membahas program-program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan dan tidak dilaksanakan atau ditunda karena tidak semua program yang diusulkan dapat dilaksanakan karena harus memikirkan dananya, fasilitasnya dan sebagainya”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil identifikasi pamong belajar tetapi juga mempertimbangkan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pembuat kebijakan. Tidak semua usulan program dari masyarakat dapat dilaksanakan oleh UPT SKB Gunungkidul karena harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul.

UPT SKB Gunungkidul menentukan prioritas program berdasarkan hasil identifikasi, masukan, serta persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Hal tersebut merupakan bagian dari analisis pemangku kepentingan yang dilakukan untuk memastikan bahwa program yang diprioritaskan mendapat persetujuan dan dukungan baik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pembuat kebijakan maupun dari masyarakat sebagai penerima program. “Analisis pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa program yang dipilih mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik yang berperan sebagai pelaksana, penerima dan pengguna hasil program dimaksud” (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 97).

Penentuan prioritas pada perencanaan program disusun berdasarkan kebutuhan, situasi, dan sumber daya yang tersedia, baik yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maupun sumber daya yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, bahwa perencanaan program harus memperhatikan sumber daya yang ada

secara cermat dengan hasil yang optimal (Sudjana, 2004: 102). Melalui kegiatan identifikasi dari pamong dan mempertimbangkan masukan Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, UPT SKB Gunungkidul dapat mengetahui apakah program yang diisusun mendapat dukungan sumber daya sehingga nantinya program tersebut bisa dilaksanakan. “Analisis sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui program yang dilakukan mendapat dukungan keuangan, fasilitas dan lainnya” (Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani, 2009: 97)

2. Implementasi Program Kemitraan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul

a. Model kemitraan UPT SKB Gunungkidul

Sebagai lembaga yang tidak dapat menyelenggarakan program secara mandiri karena memiliki keterbatasan, UPT SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga, maupun forum. Pernyataan tentang lembaga yang menjadi mitra UPT SKB Gunungkidul diungkapkan oleh KU (W.6.1), Kepala UPT SKB Gunungkidul :

“Ada banyak Mba, yang bekerjasama dengan SKB baik pemerintah maupun swasta. Lembaga yang bekerjasama dengan SKB ada P2PAUDNI, BPKB DIY, Disdikpora DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, HIMPAUDI, Forum PAUD, Forum PKBM, LKP, antara lain itu Mba, lembaga-lembaga yang biasa bekerjasama dengan SKB.”

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh “Hj” (W.6.2) pamong UPT SKB Gunungkidul :

“Lingkup kemitraan SKB mulai dari Nasional sampai Kabupaten Mba. Ada P2PAUDNI, Disdikpora DIY, BPKB DIY Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, LKP, Forum PAUD Forum PKBM, HIMPAUDI Kabupaten Gunungkidul.”

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa UPT SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Lingkup Nasional SKB Gunungkidul bermitra dengan P2PAUDNI, lingkup Provinsi SKB Gunungkidul bermitra dengan BPKB DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, sedangkan lingkup Kabupaten, UPT SKB Gunungkidul bermitra dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, berbagai forum seperti Forum PAUD dan Forum PKBM, dan LKP”.

Suatu kerjasama memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan. Persyaratan tersebut antara lain, ada dua pihak atau lebih (Ambar Teguh. 2004: 130). UPT SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga baik lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga masyarakat dari lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Kemitraan yang dijalin UPT SKB Gunungkidul dengan berbagai lembaga menunjukkan bahwa ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam kemitraan UPT SKB Gunungkidul.

UPT SKB Gunungkidul memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan program secara mandiri sehingga membutuhkan mitra-mitra untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Peran mitra sangat penting bagi UPT SKB Gunungkidul seperti yang diungkapkan oleh “KU” (W.7.1) :

“Lembaga mitra punya peran sangat penting bagi SKB. Tanpa adanya lembaga mitra program SKB tidak akan berjalan optimal, karena itu SKB sangat menghargai lembaga mitra. SKB dan lembaga mitra saling membantu memberikan solusi jika ada permasalahan. SKB

menyadari bahwa masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dengan kemitraan yang baik tentunya akan dapat saling melengkapi satu sama lain.”

Lembaga mitra memiliki peran penting dalam mendukung sumber daya yang dibutuhkan dalam program UPT SKB Gunungkidul, seperti yang diungkapkan oleh “HJ” (W.7.2) :

“Tentu lembaga mitra memiliki peran yang penting. Tanpa lembaga mitra tentu program di SKB akan terhambat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap program kan banyak dan tidak mungkin dapat dipenuhi SKB sendiri sementara dana, dan fasilitas SKB sangat terbatas. Untuk merencanakan program pun SKB butuh mitra, seperti Dinas misalnya karena dana APBD untuk program di SKB sebagian besar dari Dinas.”

Hampir semua program UPT SKB Gunungkidul dilaksanakan dengan bantuan dari mitra, selain untuk memenuhi sumber daya, mitra juga sangat diperlukan untuk mensosialisasikan program, seperti yang diungkapkan oleh “SB” (W.7.3) :

“Peran lembaga mitra itu sangat penting, hampir semua program di SKB dilaksanakan dengan bantuan mitra-mitra SKB. Dana, fasilitas yang SKB miliki itu tidak cukup, jadi SKB butuh mitra-mitra untuk membantu memenuhi sumber daya tadi dalam program-programnya. Bahkan dalam mensosialisasikan program ataupun merekrut peserta SKB juga memerlukan peran mitra Mba.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga mitra berperan penting bagi program-program di UPT SKB Gunungkidul. Hampir semua program di UPT SKB Gunungkidul dijalankan dengan kemitraan. Dana, fasilitas, SDM berupa narasumber teknis ataupun tutor, yang dibutuhkan UPT SKB Gunungkidul didukung oleh lembaga mitra, Oleh karena itu UPT SKB Gunungkidul sangat membutuhkan mitra agar dapat menyelenggarakan program dengan optimal.

UPT SKB Gunungkidul sangat membutuhkan peran mitra untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Dana, fasilitas yang memadai dan SDM sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan program-program UPT SKB Gunungkidul, khususnya bagi program kecakapan hidup dan pembelajaran tenaga pendidik non formal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep kemitraan menyebutkan bahwa saling membutuhkan merupakan syarat yang diperlukan dalam menjalin kemitraan (Ambar Teguh. 2004: 130). Peran lembaga mitra sangat mempengaruhi mutu program yang diselenggarakan dan juga mempengaruhi lulusan program.

Hubungan kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul yang juga berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus mitra tidak memerlukan perjanjian tertulis antar lembaga seperti pernyataan yang diungkapkan “KU” (W.8.1) :

“Kalau perjanjian hitam di atas putih setahu saya tidak ada, jika programnya dari APBD dan kemitraannya dengan Dinas Pendidikan tidak ada perjanjian khusus Mba, tapi kalau dari pusat yang lewat P2PAUDNI kan SKB mengajukan proposal, setelah proposal disetujui memang ada perjanjian yang intinya kesanggupan melaksanakan program.”

Hubungan kemitraan selain dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, lebih pada hubungan kerjasama yang menyangkut hal teknis sehingga juga tidak memiliki perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, seperti pernyataan “Hj” (W.8.2) :

“Kalau kemitraan dengan Dinas pendidikan tidak ada perjanjian, kemitraan sudah otomatis. Kalau dengan LKP memang ada kesepakatan, tapi tidak ada perjanjian tertulisnya karena kemitraannya

hanya ke urusan yang sifatnya teknis saja. Untuk penyaluran lulusan ke tempat usaha atau LKP juga berdasarkan kesepakatan saja. Kalau dengan lembaga pusat seperti P2PAUDNI perjanjiannya dibuat jika SKB menyelenggarakan program dari sana.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “SB” (W.8.3) yang juga pamong

UPT SKB Gunungkidul :

“Kalau kesepakatan secara tidak tertulis pasti ada, karena tidak mungkin menjalin kemitraan kalau tidak sepakat, tapi kalau yang dimaksud perjanjian hitam di atas putih setahu saya tidak ada Mba. Kemitraan dengan LKP misalnya untuk tutor atau fasilitas kursus itu, memang ada kesepakatan tapi tidak ada perjanjian tertulisnya, karena memang lembaga mitra tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis jika SKB menyelenggarakan program-program P2PAUDNI, itu setelah prosposal yang diajukan dari SKB disetujui.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan oleh “Id” (W.8.5) staff Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga :

“Tidak ada perjanjian khusus antara Dinas dan SKB, sudah terjalin sesuai kewenangannya, jadi tidak memerlukan perjanjian Mba.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “Nn” (W.8.6) yang juga staff Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga :

“Kalau antara Dinas dan SKB tidak ada perjanjian hitam di atas putih ya Mba, karena kan memang secara kelembagaan SKB berada di bawah kebijakan Dinas.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “St” (W.8.7) pengelola PKBM Sembada yang juga mitra UPT SKB Gunungkidul :

“Kalau perjanjian tertulis seperti hitam di atas putih tidak ada Mba, hanya kesepakatan yang tidak tertulis, saya dan pamong SKB sudah saling mengenal jadi, tidak harus ada perjanjian tertulis.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan

hubungan kemitraan SKB dengan lembaga lain umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasar kesepakatan saja, karena sebagian besar

kemitraan dilakukan dalam hal teknis dan lembaga mitra tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis. Sedangkan untuk kemitraan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul tidak memerlukan perjanjian karena secara kelembagaan UPT SKB Gunungkidul berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul.

Terdapat kesepakatan antar pihak yang bermitra merupakan syarat yang sebaiknya dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan (Ambar teguh, 2004: 130). Menjalin sebuah kemitraan hendaknya terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak-pihak yang menjalin kemitraan bukan sebaliknya saling merugikan antar pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan SKB Gunungkidul dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, maupun LKP terjalin tanpa ada perjanjian secara formal atau syarat khusus. Perjanjian atau syarat khusus umumnya dilakukan jika SKB menyelenggarakan program dari pemerintah pusat melalui P2PAUDNI. Kemitraan hanya dilakukan atas dasar saling percaya satu sama lain tanpa adanya kesepakatan yang mengikat secara tertulis. Tidak ada perjanjian tertulis secara khusus karena lembaga mitra tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis, begitu pun UPT SKB Gunungkidul juga tidak menuntut perjanjian tertulis dalam kemitraan.

Tidak ada perjanjian secara tertulis merupakan salah satu kelemahan dalam kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra. Secara teori menjalin kemitraan sangat membutuhkan komitmen yang kuat dan seimbang antar pihak yang bermitra agar pihak yang bermitra dapat mencapai tujuan

yang diharapkan dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang bermitra (Ambar teguh, 2004: 130). Tetapi meskipun tanpa perjanjian hubungan kemitraan sudah terjalin dengan baik sejak lama dan saling mempercayai satu sama lain. Dalam menjalin sebuah kemitraan ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar institusi atau lembaga yang bermitra (Nana Rukmana, 2006: 63).

Hubungan kemitraan UPT SKB Gunungkidul dan lembaga mitra merupakan hubungan mutualisme yang membutuhkan satu sama lain. UPT SKB Gunungkidul maupun lembaga mitra mempunyai tujuan sama yang sehingga dapat saling bekerjasama, seperti pernyataan “ KU” (W 9.1) :

“ Kalau hubungan kemitraannya SKB dengan lembaga mitra lebih ke hubungan yang mutualisme ya Mba, karena memang saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya antara SKB dan Dinas, meskipun Dinas sebagai pembuat kebijakan akan tetapi Dinas tetap membutuhkan pelaksana programnya, yaitu SKB atau bisa juga PKBM. Setiap lembaga yang menjadi mitra SKB Gunungkidul mempunyai peran masing-masing yang sama-sama penting. SKB menjalin kemitraan dengan lembaga yang menaungi pendidikan nonformal baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat, lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan sama dengan SKB sehingga bisa saling bekerjasama dan melengkapi satu sama lain untuk bisa memberikan masyarakat pendidikan yang baik melalui pendidikan non formal.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan oleh “Hj” (W.9.2) :

“ Antara SKB dan lembaga mitra bekerjasama sebagai rekan yang saling membutuhkan satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Sebagai lembaga yang sama-sama berhubungan dengan pendidikan non formal secara tidak langsung tujuan kami sama, oleh karena itu bisa saling melengkapi dan bekerjasama dengan baik. Misalnya, Dinas sebagai pembuat kebijakan, membutuhkan peran SKB atau PKBM sebagai inisiator dan pelaksana, kemudian lembaga lain seperti LKP itu membantu fasilitas dan tutor, kemudian ada forum forum yang dapat mensosialisasikan program-program SKB. Jadi harus ada kerjasama untuk mensukseskan sebuah program tidak bisa bergerak

sendiri sendiri. SKB tidak terlalu mempermasalahkan apakah lembaga itu besar atau kecil yang penting bisa saling bekerjasama dengan baik.”

UPT SKB Gunungkidul dan lembaga mitra bekerjasama sebagai rekan tanpa memandang status kelembagaan. Dalam bekerjasama menganggap semua mitra adalah sejajar dan sama-sama penting untuk mendukung program-program UPT SKB Gunungkidul agar berjalan optimal. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh “SB” (W.9.3) :

“Hubungan kemitraan antara SKB dan lembaga mitra itu lebih pada hubungan sebagai rekan kerja yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Tidak memandang status kelembagaan. Meskipun secara kelembagaan SKB berada di bawah Dinas Pendidikan ya Mba, tapi sebagai mitra antara SKB dan Dinas adalah rekan yang menganggap semuanya sama dan sejajar, karena menyadari punya peran masing masing yang sama penting, begitu juga dengan mitra-mitra lainnya sama pentingnya bagi SKB, karena mereka sangat mendukung dan membantu SKB. Kalau antara SKB dan lembaga mitra tidak bisa bekerjasama dengan baik, pasti nantinya program yang kami selenggarakan tidak bisa optimal.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul yang merupakan mitra UPT SKB Gunungkidul. Pernyataan diungkapkan oleh “Id” (W 9. 5) :

“Sebenarnya antara Dinas dan SKB saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dinas sebagai pembuat kebijakan tentunya membutuhkan peran SKB sebagai pelaksana, begitu juga SKB juga perlu dukungan dari Dinas jika ingin menyelenggarakan program. Jadi saling membutuhkan karena masing-masing memiliki peran yang sama-sama penting.”

Pernyataan yang mendukung juga diungkapkan “Nn”(W 9. 6) yang juga staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul :

“Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara kelembagaan SKB memang bawah Dinas, tapi sebagai mitra kami bekerjasama dengan baik tanpa memandang Dinas itu atasan dan SKB itu bawahan. Hubungan kemitraannya ya hubungan sebagai mitra yang

memberikan manfaat satu sama lain. Antara Dinas dan SKB membutuhkan satu sama lain, punya peran masing-masing yang sama pentingnya. Tujuan Dinas dan SKB kurang lebih sama Mba, sama-sama ingin memberikan masyarakat Gunungkidul pendidikan yang layak melalui program-program pendidikan non formal.”

Pernyataan pihak UPT SKB Gunungkidul dan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul juga didukung oleh pengelola PKBM Sembada, yang menjadi mitra UPT SKB Gunungkidul dan pernah menyelenggarakan program bersama. Pernyataan diungkapkan oleh “St” (W.9. 7) pengelola PKBM Sembada :

“Hubungan PKBM ini dengan SKB sebagai mitra terjalin baik dan saling memberikan manfaat satu sama lain Mba. Ada program-program SKB Gunungkidul yang diselenggarakan bersama dengan PKBM ini, salah satunya koran ibu Mba, yang dilaksanakan di PKBM ini, dan program itu akhirnya memberikan manfaat besar bagi PKBM ini dan masyarakat sekitar daerah ini juga Mba.”

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan hubungan kemitraan yang diterapkan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra cenderung kepada hubungan kemitraan muatualisme atau hubungan kemitraan saling melengkapi satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan. Kedua belah pihak menyadari pentingnya menjalin kemitraan dan dapat saling memberikan dan mendapatkan manfaat. UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra bekerjasama dengan baik sebagai rekan yang saling melengkapi satu sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan masyarakat Gunungkidul pendidikan yang layak melalui program-program pendidikan non formal. Dalam kemitraan kesamaan tujuan merupakan syarat yang harus dimiliki antara lembaga yang akan melakukan kemitraan (Ambar Teguh, 2004 : 130).

UPT SKB Gunungkidul tidak menganggap mitra lebih rendah ataupun lebih tinggi, akan tetapi diposisikan sebagai rekan yang memiliki posisi sama atau sejajar. Meskipun secara kelambagaan UPT SKB Gunungkidul berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, tetapi sebagai mitra UPT SKB Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saling bekerjasama sebagai rekan yang sejajar, tanpa ada atasan maupun bawahan. Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat salah satu prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati (Ditjen P2L & PM, dalam Kuswidanti, 2008). Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya.

Prinsip kesetaraan yang diterapkan oleh SKB Gunungkidul dengan lembaga lain menunjukkan bahwa UPT SKB Gunungkidul berusaha mensejajarkan dengan lembaga-lembaga yang menjadi mitranya dan menerapkan kemitraan *linear collaborative of partnership*. *Linear collaborative of partnership* artinya pihak-pihak yang bermitra tidak membedakan besaran, volume, status/legalitas tetapi lebih menekankan pada kesamaan visi/misi yang saling mengisi satu dengan lainnya (Ambar Teguh. 2004: 132).

Dengan hubungan kemitraan yang terjalin baik dengan lembaga mitra UPT SKB Gunungkidul mendapatkan beberapa manfaat dari kemitraan tersebut. Seperti pernyataan “KU” (W 10.1) :

“Memang ada beberapa manfaat yang diperoleh SKB dari kemitraan, pertama SKB dapat menyelenggarakan program dengan konsisten karena didukung dana, fasilitas, narasumber dari mitra. Manfaat kedua lulusan-lulusan kursus SKB dapat disalurkan. Manfaat ketiga jangkauan program-program SKB juga lebih luas karena kan mitra kami membantu juga dalam mensosialisasikan program.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh “Hj” (W 10.2) :

“Manfaatnya tentu positif bagi SKB, kelancaran pelaksanaan program SKB juga dipengaruhi oleh lembaga mitra. SKB mendapatkan dukungan dana, fasilitas maupun sumber daya manusia berupa narasumber sehingga program-program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam penyaluran lulusan juga SKB mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan lulusan kursus ke lembaga-lembaga mitra seperti LKP ataupun pemilik usaha seperti salon, rias atau kursus vokal malah sudah ada yang *recording*. ”

Selain mendapatkan dukungan sumber daya, kemitraan juga bermanfaat untuk mengatasi kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan program, seperti pernyataan “SB” (W.10.3)

“Manfaatnya antara lain program-program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal karena ada dukungan dana, fasilitas, SDM juga. SKB dapat mengatasi kendala-kendala teknis yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan program, program SKB juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas karena lembaga mitra juga membantu mensosialisasikan program SKB. SKB juga memperoleh kemudahan dalam menyalurkan lulusan ke pemilik usaha atau LKP.”

Manfaat tidak hanya dirasakan oleh UPT SKB Gunungkidul tetapi juga dirasakan oleh lembaga yang bermitra dengan UPT SKB Gunungkidul. Dengan kemitraan yang terjalin program yang dilaksanakan dapat konsisten, seperti yang diungkapkan oleh “Id” (W 10.5) :

“Kalau manfaat, diantaranya ya program yang dimiliki Dinas dapat dilaksanakan dengan konsisten karena ada yang membantu Dinas untuk merancang program, kemudian terjalinnya kerjasama yang semakin baik antara Dinas dengan SKB itu sendiri.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “St” (W 10.7) pengelola PKBM Sembada yang juga mendapatkan manfaat dari kemitraan :

“Sejauh ini kemitraan manfaatnya positif bagi PKBM Mba, antara lain PKBM bisa menyelenggarakan program baru bagi masyarakat sekitar PKBM ini, kemudian tutor PKBM bisa mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh SKB untuk meningkatkan kompetensinya.”

Berdasarkan pernyataan dari wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul dan lembaga memiliki manfaat positif bagi UPT SKB Gunungkidul maupun bagi lembaga mitra. Manfaat kemitraan bagi UPT SKB Gunungkidul adalah :

- 1) UPT SKB Gunungkidul mendapatkan dukungan sumber daya yaitu dana dan fasilitas yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan program-program SKB.
- 2) UPT SKB Gunungkidul dapat mengatasi kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan program-programnya.
- 3) Lulusan program SKB dapat disalurkan untuk magang ke pemilik usaha atau LKP sehingga keterampilan yang sudah dimiliki dapat bermanfaat dan mutu output program UPT SKB Gunungkidul dapat meningkat.

Manfaat kemitraan juga diperoleh oleh lembaga mitra, antara lain :

- 1) Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul adanya kemitraan dapat menjaga konsistensi program yang dilaksanakan, baik

program Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga maupun program SKB.

- 2) Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemitraan yang terjalin semakin mempererat hubungan dengan UPT SKB Gunungkidul, bukan sebagai atasan dan bawahan akan tetapi sebagai mitra yang saling bekerjasama mewujudkan program bagi masyarakat.
- 3) Bagi PKBM dengan kerjasama dengan UPT SKB Gunungkidul dapat menyelenggarakan program baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 4) Tutor PKBM dapat mengikuti Diklat peningkatan kompetensi yang diselenggarakan UPT SKB Gunungkidul.

Secara teori prinsip yang harus dijadikan acuan dalam kemitraan salah satunya adalah prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*). Prinsip *mutual benefit* berarti Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing (Ditjen P2L & PM, dalam Kuswidanti, 2008). Dari hasil penelitian, UPT SKB Gunungkidul mendapat manfaat dari kemitraan yang dilakukan seperti mendapat dukungan sumber daya, dapat menyalurkan lulusan program dan dapat mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan programnya. Kemitraan UPT SKB Gunungkidul juga memberikan manfaat yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bermitra. Dengan prinsip *mutual benefit* antara UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain peneliti menyimpulkan, bahwa model yang diterapkan dalam kemitraan UPT SKB dengan lembaga lain adalah model kemitraan mutualistik. Model kemitraan

mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal (Ambar Teguh, 2004: 131).

Kerjasama antara UPT SKB Gunungkidul dengan berbagai lembaga dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama Seperti yang diungkapkan oleh “KU” (W.11.1) :

“ Bentuknya bisa macam-macam Mba. Kalau yang berbentuk dana itu dari Dinas Mba, karena kan dana biasanya dari APBD. Kemudian untuk yang berbentuk tutor atau narasumber Mba, itu bisa dari Dinas juga, dari BPKB, dari Dikpora DIY atau LKP, sedangkan untuk fasilitas peralatan SKB juga bekerjasama dengan lembaga yang punya fasilitas seperti LKP. Kemudian dari Forum PAUD, dan PKBM, jadi jika ada program SKB melakukan sosialisasi kepada forum tersebut. Kalau dari P2PAUDNI itu lebih ke program Mba, jadi misalnya P2PAUDNI ada program, dari sana kemudian mengadakan sosialisasi agar kita dapat mengakses programnya dengan proposal. Ada juga yang bentuknya penyaluran lulusan program Mba, jadi lulusan kursus itu biasanya disalurkan ke pemilik usaha atau LKP.”

Kemitraan biasanya dilakukan terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis.

Seperti pernyataan “Hj” (W.11.2) :

“Kemitraan yang dijalin selama ini biasanya terkait dengan hal-hal teknis, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan narasumber dalam setiap program. Narasumber itu bisa dari LKP, Dinas bidang PAUDNI, terkadang juga BPKB Yogyakarta. Kemudian dalam bentuk penyaluran lulusan program ke pemilik beberapa usaha atau LKP. Jika yang berhubungan dengan dana, SKB menjalin kerjasama dengan Dinas. SKB juga bekerjasama dengan lembaga yang punya fasilitas, misalnya untuk kursus yang butuh peralatan, jika SKB tidak ada dana untuk membeli peralatan, maka SKB menjalin kerjasama dengan LKP yang mempunyai peralatan untuk kursus itu.

Pernyataan juga diungkapkan oleh “SB (W.11.3) :

“ Jika dengan Dinas bentuk kerjasamanya biasanya dana, karena dana APBD itu kan lewatnya Dinas ya Mba. Dengan lembaga lain selain Dinas kerjasama bisa dalam bentuk SKB mendatangkan narasumber dari lembaga lain seperti dari BPKB, Dinas Provisi, kemudian jika ada diklat misalnya, SKB bekerjasama untuk sosialisasi dengan forum-forum seperti forum PAUD, dan PKBM karena kebanyakan peserta berasal dari forum tersebut, jika yang berhubungan dengan PAUD bekerjasama sama juga dengan HIMPAUDI. Kemudian untuk kerjasama dengan para pemilik usaha atau LKP dalam bentuk pengadaan tutor dan dalam penyaluran lulusan kursus. Ada juga dalam bentuk program, P2PAUDNI kan biasanya punya program, SKB diberikan akses untuk bisa melaksanakan program itu dengan mengajukan proposal.”

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau kerjasama UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk dukungan sumber daya seperti dana, fasilitas, maupun narasumber teknis yang digunakan untuk mendukung program-program UPT SKB Gunungkidul. Kerjasama dengan berbagai forum seperti forum PAUD, Forum PKBM, maupun HIMPAUDI dilakukan dalam bentuk mensosialisasikan program UPT SKB Gunungkidul kepada forum-forum tersebut agar anggota dari berbagai forum tersebut dapat berpartisipasi pada program-program yang diselenggarakan UPT SKB Gunungkidul.

Pihak-pihak yang bermitra saling mengisi satu sama lain dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dilakukan dalam bentuk saling membantu fasilitas, SDM, menyalurkan lulusan program dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program yang diselenggarakan UPT SKB Gunungkidul. Bentuk-bentuk kemitraan yang

dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul dengan berbagai lembaga sebagai bagian dari kemitraan *linear collaborative of partnership*. *Linear collaborative of partnership* artinya pihak-pihak yang bermitra tidak membedakan besaran, volume, status/legalitas tetapi menekankan kesamaan visi/misi yang saling mengisi satu dengan lainnya (Ambar Teguh, 2004: 132). UPT SKB Gunungkidul melakukan berbagai bentuk kerjasama dari berbagai lembaga yang secara besaran, status, legalitas berbeda tetapi lembaga-lembaga tersebut bersedia bekerjasama dan dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain.

b. Mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul

UPT SKB Gunungkidul melakukan kemitraan dengan berbagai lembaga mitra baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Nama UPT SKB Gunungkidul sudah dikenal diseluruh Kabupaten Gunungkidul, sehingga tidak menemukan kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kemitraan dengan lembaga pemerintah di bidang non formal seperti P2PAUDNI, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Yogyakarta, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Yogyakarta, kemitraan terjalin tanpa ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul. Para pamong UPT SKB Gunungkidul umumnya juga memiliki hubungan personal yang baik dengan pengelola lembaga swasta seperti PKBM atau LKP, sehingga tidak ada kesulitan untuk menjalin kemitraan. Seperti yang diungkapkan oleh “KU” (W.12.1) :

“Sederhana saja dan tidak rumit Mba, untuk dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan Gunungkidul, Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagainya lembaga-lembaga seperti itu tidak perlu cara khusus. Untuk kemitraan dengan PKBM ataupun dengan LKP biasanya pamong yang mengusulkan untuk bermitra dengan lembaga tersebut. Biasanya para pamong sudah mengenal secara personal para pengelola PKBM atau LKP, sehingga tidak ada yang rumit, pamong langsung datang atau menghubungi lembaga yang akan diajak bermitra untuk kemudian SKB meminta kerjasama dengan lembaga tersebut. Kalau lembaga tersebut bersedia diajak kerjasama maka kami dan pengelola lembaga tersebut kemudian berdiskusi lebih lanjut lagi membicarakan tentang kerjasama yang akan dilakukan.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “ Hj” (W.12.2) :

“ Umumnya yang diajak bermitra dengan SKB lembaga-lembaga yang pengelolanya sudah dikenal oleh pihak SKB, pamong SKB yang biasanya mengajukan usulan. jadi antara pamong biasanya saling diskusi untuk menentukan lembaga mana yang bisa memberikan bantuan untuk program SKB atau bekerjasama dengan SKB. Setelah lembaga yang diusulkan disepakati bersama, pihak SKB bisa menghubungi atau mendatangi lembaga yang akan diajak kerjasama. Jika lembaga tersebut bersedia kerjasama maka selanjutnya antara pihak SKB dan lembaga tersebut mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang hal-hal teknis tentang kerjasama yang akan dilakukan. Tidak terlalu rumit, sederhana saja karena SKB kan juga sudah dikenal jadi lembaga yang akan diajak kerjasama juga sudah percaya dan SKB juga berupaya menjalin kerjasama sebaik mungkin sehingga lembaga yang diajak bermitra tidak merasa dirugikan”.

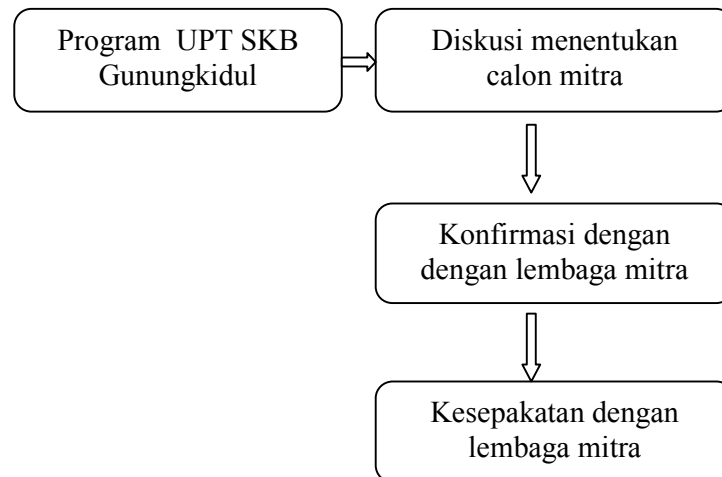
Kemitraan dengan lembaga swasta seperti LKP, umumnya ada penawaran tertentu yang diberikan pihak UPT SKB Gunungkidul. Seperti pernyataan “SB” (W.12.3) :

“Tidak terlalu rumit kok Mba, cukup sederhana. Pertama, pihak SKB kan melihat dulu program apa yang akan dilaksanakan, kemudian pamong-pamong SKB diskusi dan mengajukan usulan kira-kira lembaga mana atau siapa yang bisa membantu untuk diajak kerjasama. Setelah diputuskan bersama, pihak SKB kemudian mendatangi atau menghubungi yang akan diajak kerjasama, kalau yang diajak kerjasama itu LKP untuk masalah narasumber maupun tempat untuk kursus, SKB memberikan penawaran-penawaran tertentu, misalnya tentang kontribusi dengan jumlah tertentu yang diberikan SKB untuk pengelola ataupun narasumber tersebut. Setelah pengelola tersebut bersedia diajak kerjasama, maka SKB membicarakan lebih lanjut hal-

hal teknis tentang kerjasama itu. Sederhana karena umumnya yang diajak bermitra lembaga yang sudah dikenal oleh pamong-pamong SKB dan mitra sudah percaya, jadi tidak terlalu rumit.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa UPT SKB Gunungkidul yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Gunungkidul, memiliki mekanisme kemitraan yang sederhana yang dilakukan tanpa prosedur secara khusus dan tidak menyulitkan bagi UPT SKB Gunungkidul maupun bagi lembaga mitra. Dapat dijelaskan secara sederhana mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra, sebagai berikut :

- 1) Para pamong melakukan diskusi tentang calon lembaga yang akan diajak bermitra sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Calon mitra umumnya merupakan usulan dari pamong UPT SKB Gunungkidul yang telah mengetahui kualitas lembaga mitra ataupun mengenal secara personal pengelola calon lembaga mitra. Tujuan memilih calon mitra yang sudah dikenal adalah untuk memudahkan dalam melakukan proses kemitraan.
- 2) Setelah memutuskan calon lembaga yang akan diajak bermitra pihak UPT SKB Gunungkidul menghubungi atau mendatangi langsung calon lembaga mitra untuk kemudian menyampaikan maksud dari kemitraan tersebut.
- 3) Jika calon mitra setuju untuk bekerjasama maka UPT SKB Gunungkidul dan lembaga mitra mengadakan pembicaraan lebih lanjut hal-hal teknis mengenai kemitraan yang akan dilakukan.



Gambar 2. Mekanisme Kemitraan UPT SKB Gunungkidul

c. Faktor pendukung dan penghambat Kemitraan UPT SKB Gunungkidul

Dalam menjalin kemitraan tentunya terdapat faktor yang mendukung dan dan menghambat kemitraan. Faktor pendukung dan penghambat kemitraan tersebut diungkapkan oleh “KU” (W13.1) :

“Untuk faktor yang menghambat, meskipun menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga pemerintah ya Mba, tapi untuk kemitraan yang bentuknya dana itu agak susah, satu program di SKB tidak bisa dibiayai oleh 2 lembaga pemerintah, kalau dari APBD ya dari Dinas itu. Kalau faktor pendukungnya SKB kan punya banyak lembaga mitra ya, dan sejauh ini hubungan dengan lembaga mitra tidak ada masalah Mba, hubungan SKB dengan lembaga mitra sudah terjalin dengan baik. Para pamong SKB umunya punya *link* ke beberapa lembaga mitra SKB, jadi itu mendukung juga Mba.”

Pernyataan lainnya juga diungkapkan oleh “SB” (W 13.3) :

“Faktor pendukung kemitraan antara lain dari segi sumber daya Mba, lembaga mitra memiliki sumber daya yang mendukung program program SKB baik itu dana maupun fasilitas. Kemudian dari segi jaringan atau *link* yang lumayan luas mencakup tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Gunungkidul. Untuk faktor penghambat biasanya dana, untuk dapat melaksanakan program SKB perlu mendapat dukungan dana dari lembaga lainnya akan tetapi sesuai

peraturan satu program tidak mungkin dibiayai dua lembaga pemerintah, meskipun itu sangat diperlukan.”

Pernyataan juga diungkapkan oleh “Id” (W.13.5) Staff Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Gunungkidul :

“Faktor yang menghambat saya rasa tidak ada Mba, semuanya terjalin dengan baik, baik dari SKB maupun Dinas saling menjaga hubungan baik. Kalau faktor yang mendukung, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas bisa mendukung program-program SKB.”

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka penulis dapat menyimpulkan faktor pendukung kemitraan UPT SKB Gunungkidul, antara lain :

- 1) Faktor sumber daya baik dana, fasilitas maupun SDM dari lembaga mitra yang mendukung program UPT SKB Gunungkidul.
- 2) Jaringan yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul baik lembaga pemerintah maupun swasta yang melingkupi tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten.

Sedangkan faktor yang menghambat kemitraan UPT SKB Gunungkidul antara lain :

- 1) Dana yang hanya berasal dari satu lembaga pemerintah. Meskipun banyak lembaga yang menjadi mitra UPT SKB Gunungkidul tetapi sesuai peraturan satu program hanya bisa dibiayai satu lembaga pemerintah.

C. Ringkasan Hasil Penelitian

Tabel 3 : Ringkasan Hasil Penelitian

Aspek yang diteliti	Hasil
Perencanaan program kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul dilatarbelakangi oleh kebutuhan sumber daya untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan, kebutuhan untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program. 2. Perencanaan program UPT SKB Gunungkidul melibatkan partisipasi dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan. 3. Tujuan perencanaan program UPT SKB Gunungkidul adalah memberikan kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan, yang nantinya dapat dipergunakan secara produktif untuk bekerja maupun membuka usaha sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. 4. Tahapan perencanaan program UPT SKB Gunungkidul diawali dengan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan mendengarkan masukan masyarakat, kemudian mendengarkan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pembuat kebijakan, selanjutnya dilakukan rapat koordinasi menentukan prioritas program
Implementasi model kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung program-programnya. 2. UPT SKB Gunungkidul mengimplementasikan model kemitraan mutualistik dengan menerapkan prinsip <i>mutual benefit</i>. Dalam menjalin kemitraan UPT SKB Gunungkidul tidak terlalu mempermasalahkan status kelembagaan, yang terpenting, lembaga tersebut dapat saling bekerjasama dengan baik dan masing-masing memperoleh manfaat dari kemitraan yang dilaksanakan. 3. UPT SKB Gunungkidul mendapatkan manfaat dari kemitraan yang dilaksanakan seperti mendapatkan dukungan sumber daya, dapat menyalurkan lulusan program dan dapat mengatasi kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan programnya. 4. Sumber daya baik dana, fasilitas maupun SDM yang dimiliki lembaga mitra menjadi faktor yang mendukung kemitraan. Faktor pendukung lain adalah jaringan yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul dilatarbelakangi kebutuhan dana, fasilitas, dan SDM untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan, kebutuhan lembaga untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program kecakapan hidup.
2. Perencanaan program UPT SKB Gunungkidul melibatkan partisipasi dari dalam lembaga, yaitu pihak UPT SKB Gunungkidul dan luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan.
3. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul diawali dengan kegiatan identifikasi oleh para pamong, mendengarkan masukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan dan penentuan prioritas program melalui rapat koordinasi antara UPT SKB Gunungkidul dan pembuat kebijakan.
4. UPT SKB Gunungkidul mengimplementasikan model kemitraan mutualistik dengan prinsip *mutual benefit* yaitu kedua belah pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat dari kemitraan yang dilakukan. UPT SKB Gunungkidul mendapat manfaat dari kemitraan yang dilakukan yaitu mendapat dukungan sumberdaya, dapat menyalurkan lulusan program dan dapat mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan programnya.

5. Mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul dilakukan secara sederhana. Para pamong melakukan diskusi menentukan calon mitra sesuai dengan program yang akan dilaksanakan, setelah memutuskan calon lembaga yang akan diajak bermitra pihak UPT SKB Gunungkidul menghubungi atau mendatangi langsung calon lembaga mitra, jika calon mitra setuju untuk bekerjasama maka UPT SKB Gunungkidul dan lembaga mitra mengadakan pembicaraan lebih lanjut hal-hal teknis mengenai kemitraan yang akan dilakukan.
6. Faktor pendukung kemitraan UPT SKB Gunungkidul antara lain 1). Faktor sumberdaya baik dana, fasilitas, dan SDM dari lembaga mitra yang mendukung program UPT SKB Gunungkidul. 2) jaringan atau *link* yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul baik lembaga pemerintah maupun swasta yang melingkupi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Faktor yang menghambat kemitraan, yaitu satu program yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul hanya dapat dibiayai satu lembaga pemerintah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui model kemitraan maka peneliti mengajukan saran :

1. UPT SKB Gunungkidul diharapkan dapat lebih aktif melakukan kerjasama dengan lembaga swasta maupun lembaga masyarakat untuk memperoleh dana, dukungan fasilitas dan SDM.

2. Hubungan kemitraan dengan para pemilik usaha lebih ditingkatkan agar para lulusan dapat disalurkan dan memiliki kesempatan lebih luas untuk dapat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyan. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anonim. (2010). *Pamong Belajar Masih dipandang Sebelah Mata*. Diakses dari <http://www.kalimantan-news.com>, pada tanggal 17 April 2013, jam 11.50
- _____. (2013). *Sanggar Kegiatan Belajar Jaring Potensi Kewirausahaan Masyarakat*. Diakses dari <http://www.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 17 April 2013, jam 12.03.
- Dina. (2012). *Sinergikan PKBM dan SKB*. Diakses dari <http://www.paudni.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 17 April 2013, jam 11.30
- Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Jogjakarta : Ar-ruzz Media.
- Endang Soenarya. (2000). *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Euis Sunarti. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat.Pdf*. Diakses dari <http://www.euissunarti.staff.ipb.ac.id>, pada tanggal 18 Desember 2014, jam 12.30
- Fasli Jalal & Dedi supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Fauzi. (2012). *Sanggar Kegiatan Belajar dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010*. Diakses dari <http://www.skbwilayahgemolong.blogspot.com>, pada tanggal 17 April 2013, jam 11.45
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kuswidanti. (2008). *Gambaran Kemitraan-tinjauan literatur.pdf*. Diakses dari <http://www.lontar.ui.ac.id>, pada tanggal 17 April 2013, jam 12.30
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif rev.ed*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya
- Nana Rukmana. (2006). *Strategic Partnering For Education Management -Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.

- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Irine Astuti D. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana. (2004). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwo. (2007). *Analisis Kebutuhan Masyarakat.Pdf*. Diakses dari <http://www.staff.uny.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2014, jam 14.30
- Tim Penyusun KBBI. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Udin Syaefudin Sa'ud & Abin Syamsuddin Makmun. (2005). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yoyon Suryono, Iis Prasetyo & Entoh Tohani. (2009). *Peningkatan Kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara
Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui
Model Kemitraan
Untuk Kepala UPT SKB Gunungkidul

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan terakhir :

II. Identitas Diri Lembaga

1. Kapan SKB Gunungkidul berdiri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya SKB Gunungkidul?
3. Berapa jumlah pegawai SKB Gunungkidul?

III. Perencanaan Program Kemitraan UPT SKB Gunungkidul

2. Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program kemitraan UPT
SKB Gunungkidul ?

4. Apa saja rencana program yang akan dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul pada tahun ini?
5. Apa tujuan UPT SKB Gunungkidul merencanakan program kemitraan ini?
6. Seperti apa proses perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?

IV. Implementasi Kemitraan Lembaga

7. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan UPT SKB Gunungkidul ?
8. Seberapa penting peran lembaga mitra bagi UPT SKB Gunungkidul?
9. Apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan lembaga mitra?
10. Hubungan kemitraan seperti apa yang diterapkan antara SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra?
11. Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?
12. Seperti apa bentuk kemitraan antara UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain?
13. Seperti apa mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?
14. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kemitraan lembaga?

Pedoman Wawancara
Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui
Model Kemitraan
Untuk Pamong SKB Gunungkidul

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Usia :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Pendidikan :

II. Perencanaan Program Kemitraan UPT SKB Gunungkidul

1. Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul
2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?
3. Apa saja rencana program yang akan dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul pada tahun ini?
4. Apa tujuan UPT SKB Gunungkidul merencanakan program kemitraan ini?
5. Seperti apa proses perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?

III. Implementasi Kemitraan Lembaga

6. Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan UPT SKB Gunungkidul ?
7. Seberapa penting peran lembaga mitra bagi UPT SKB Gunungkidul?
8. Apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan lembaga mitra?
9. Hubungan kemitraan seperti apa yang diterapkan antara SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra?
10. Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?
11. Seperti apa bentuk kemitraan antara UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain?
12. Seperti apa mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?
13. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kemitraan lembaga?

Pedoman Wawancara
Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Gunungkidul melalui
Model Kemitraan
Untuk Lembaga Mitra

I. Identitas Diri

1. Nama : (Lakilaki/Perempuan)
2. Usia :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Pendidikan :

II. Perencanaan Program Lembaga

1. Apakah lembaga ini dilibatkan dalam perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul
2. Seperti apa bentuk keterlibatan lembaga ini dalam perencanaan program lembaga

III. Implementasi Kemitraan Lembaga

3. Apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan lembaga mitra dalam hal ini UPT SKB Gunungkidul?
4. Seperti apa bentuk kemitraan yang dijalankan lembaga ini dengan UPT SKB Gunungkidul?
5. Hubungan kemitraan seperti apa yang diterapkan lembaga ini dengan SKB Gunungkidul?

6. Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?
7. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?

ANALISIS DATA
(Reduksi, Penyajian dan Kesimpulan)

HASIL WAWANCARA PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN

Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?

KU (W.1.1) : “Alasannya sumber daya SKB ini kan terbatas, sedangkan untuk bisa melaksanakan program SKB kan butuh fasilitas, dana, narasumber. Hampir semua program yang Kami selenggarakan bermitra dengan lembaga lain Mba, karena SKB kan punya keterbatasan. SKB punya pamong yang dapat merancang program, tapi dana, fasilitas, narasumber, hal-hal seperti itu yang menjadi kendala Kami, jadi kami membutuhkan pihak lain untuk mengatasi kendala tersebut. SKB memang punya fasilitas tetapi kan tidak lengkap misalnya untuk kursus potong rambut, SKB tidak punya peralatan potong rambut makanya SKB bekarja sama dengan lembaga lain, pamong di SKB juga tidak ada yang bisa potong rambut, makanya butuh narasumber dari luar. Jadi ya itulah mengapa SKB butuh kerjasama dengan lembaga lain karena sumber daya di SKB ini terbatas.”

Hj (W.1.2) : “Ada beberapa alasan mengapa SKB melakukan kemitraan, pertama memang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. SKB tidak mungkin melakukan program secara mandiri karena sumber daya yang dimiliki SKB itu terbatas, kedua untuk menjaga mutu program termasuk mutu output program, ketiga penyaluran lulusan program. Para lulusan program kecakapan hidup sebagian disalurkan ke berbagai tempat usaha seperti salon, rias pengantin, penjahit meskipun tidak semuanya karena ada juga lulusan kursus yang memilih membuka usaha sendiri. Itu juga bagian dari kemitraan yang dilakukan SKB.”

SB (W.1.3) : “Alasan utamanya masalah sumber daya ya Mba, karena program SKB kan butuh dana besar, fasilitas, narasumber, yang tidak semuanya dimiliki SKB, makanya SKB butuh mitra. selain itu SKB juga membutuhkan mitra untuk penyaluran lulusan Mba. Lulusan kursus ada yang magang ditempat usaha seperti salon atau rias pengantin Mba, jadi nantinya keterampilan mereka dapat terasah dan dapat pengalaman kerja juga. Biasanya Mba, yang punya salon atau rias itu senang Mba, jika ada lulusan SKB yang magang di tempat mereka.”

Rt (W.1.4) : “Karena sumber daya yang dimiliki SKB terbatas Mba. Dari dana terbatas, fasilitas terbatas, terus untuk narasumber misalnya SKB harus mendatangkan orang lain di luar SKB. Program-program

yang dilaksanakan SKB umumnya kerjasama dengan lembaga lain. Kami memerlukan dukungan karena dalam membuat program banyak yang dibutuhkan, dari mulai dana, fasilitas, narasumber. Dengan kerjasama dengan lembaga lain, paling tidak permasalahan tadi dapat diatasi.”

Kesimpulan : Alasan yang melatarbelakangi kemitraan SKB Gunungkidul antara lain 1). Kebutuhan dana, fasilitas dan SDM berupa narasumber teknis atau tutor untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan. 2). UPT SKB Gunungkidul berusaha menjaga mutu program khususnya output program. 3) Untuk menyalurkan lulusan program kecakapan hidup ke berbagai tempat sesuai bidang yang dibutuhkan.

Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program kemitraan SKB Gunungkidul?

KU (W.2.1) : “SKB kan dibawah Dinas, jadi dari Dinas dilibatkan juga, selain dari Dinas, SKB melihat program apa yang akan dilaksanakan, intinya keterlibatan pihak luar disesuaikan dengan program apa yang akan dilaksanakan. Kalau lingkup SKB sendiri ada kepala SKB, TU, pamong, untuk yang di luar SKB biasanya ada Dinas. Selain itu SKB juga menjalin mitra dengan lembaga lain, ada Forum-forum seperti Forum tutor, Forum PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi, LKP, tapi untuk yang selain Dinas seperti tadi yang sudah saya katakan keterlibatan pihak di luar SKB disesuaikan. Kalau masyarakat keterlibatannya dengan memberikan usulan program kepada pamong, kemudian usulan masyarakat itu kami tampung untuk diajukan dalam rapat perencanaan program, nanti usulan tersebut bisa dilaksanakan atau bisa juga tidak.”

Hj (W.2.2) : “Umumnya ada pihak di luar SKB yang terlibat dalam perencanaan program di SKB, Ini terkait dengan sumber daya yang nantinya diperlukan dalam setiap program. Selain dari SKB tentu Dinas juga dilibatkan dalam perencanaan program karena program yang nanti akan dilaksanakan harus melalui persetujuan Dinas. Kalau dari pihak SKB ada kepala UPT SKB, Kasubag TU, pamong, kalau dari pihak luar Dinas misalnya ada Koordinator Penilik, Kasi PAUD dan Kasi PLS, juga ada Forum-forum seperti Forum tutor, Forum PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi, LKP jika itu untuk program kursus. Tapi itu juga tergantung program apa yang nantinya akan dilaksanakan, yang pasti disesuaikan.”

SB (W.2.3) : “Perencanaan program di SKB umumnya melibatkan beberapa pihak, tergantung program apa yang akan dilaksanakan, semakin besar programnya maka yang dilibatkan akan lebih banyak, karena

kebutuhannya juga pasti lebih banyak. tergantung program yang akan dilaksanakan Mba. Pihak SKB sendiri yang biasanya terlibat dalam perencanaan program itu ada Kepala SKB, TU, Pamong, kalau dari luar ada Dikpora Gunungkidul. Kebutuhan setiap program berbeda jadi yang terlibat juga berbeda. SKB kan juga bekerja sama dengan pihak lain selain Dinas, ada berbagai forum, HIMPAUDI juga ada, PKBM, LKP, nah itu juga dilibatkan.”

Rt (W.2.4) : “ Selain dari SKB sendiri ada dari Dinas Pemuda dan Olahraga karena biasanya dananya dari Pemda. Selain dari SKB dan Dinas ada juga dari lembaga lain, untuk kursus misalnya SKB nanti melibatkan lembaga kursus juga karena di SKB kan belum banyak yang menguasai tentang kerampilan kursus. Kalau Diklat SKB biasanya melibatkan berbagai forum bisa itu forum PAUD, atau Forum tutor tergantung diklatnya. PKBM juga bisa kami libatkan juga”.

Id (W.2.5) : “Dinas memang terlibat Mba dalam perencanaan program SKB karena program yang dilaksanakan SKB perlu mendapatkan persetujuan dari Dinas sebagai pembuat kebijakan. Dana untuk program SKB memang kebanyakan dari APBD Mba, jadi ada anggaran dari Dinas untuk SKB Mba. Tidak semua usulan program SKB bisa kami terima karena anggaran dananya memang terbatas, jadi programnya harus menyesuaikan anggaran yang tersedia, tidak semuanya bisa dilaksanakan. Dinas juga bisa memberikan masukan program pada SKB, jadi Dinas meminta programnya untuk dilaksanakan oleh SKB dengan pertimbangan SKB kan punya pamong yang bisa merancang program, tapi untuk dana, fasilitas dan sebagainya Dinas membantu menyediakan.”

Nn (W.2.6) : “Dinas juga dilibatkan dalam perencanaan program SKB Mba, karena bagaimanapun Dinas sebagai pembuat kebijakan. Dinas perlu memberikan persetujuannya untuk program yang akan dilaksanakan oleh SKB atau bisa juga Dinas memberikan masukan program pada SKB. SKB memerlukan persetujuan dari Dinas untuk program-programnya karena sebagian besar dana untuk program berasal dari Dinas. Antara Dinas dan SKB saling *sharing* untuk program apa yang sebaiknya dilaksanakan dan tidak karena anggarannya kan juga terbatas, jadi tidak semua usulan dari SKB bisa kami terima karena harus menyesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat.”

St (W.2.7) : “Tidak selalu Mba, Kalau misalnya programnya untuk meningkatkan kompetensi tutor PKBM, ya kami ikut dilibatkan, biasanya untuk masalah teknis, seperti sosialisasi program Mba.”

Kesimpulan : Perencanaan program kemitraan UPT Gunungkidul melibatkan pihak dari UPT SKB Gunungkidul sendiri yang terdiri dari Kepala UPT SKB Gunungkidul, pamong dan Tata Usaha, serta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sebagai pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan.

Apa saja rencana program yang akan dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul pada tahun ini?

KU (W.3.1) : “SKB selalu memiliki program rutin, ada Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, pengembangan kurikulum bahan ajar, kemudian program kecakapan hidup atau kursus dan ada program Pembelajaran Tenaga Pendidik non Formal yang kegiatannya berupa diklat-diklat seperti itu Mba.”

Hj (W.3.2) : “Yang rutin dilaksanakan SKB ada empat program, Pengembangan data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik non Formal. Pengembangan Data Informasi Pendidikan Non formal itu SKB melakukan pendataan-pendataan seperti jumlah PKBM di Gunungkidul, jumlah tutor di Gunungkidul, tingkat pendidikan, jumlah pendidik PAUD, tingkat pendidikan dan sebagainya. Untuk pendidikan kecakapan hidup Kami mendasar pada kebutuhan masyarakat. Melihat kondisi sebagian besar masyarakat yang memiliki perekonomian pas-pasan atau menengah kebawah masyarakat membutuhkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha. Kursus itu tiap tahunnya banyak peminatnya, banyak masyarakat yang datang ke SKB untuk bertanya ke SKB kursus apa saja yang dilaksanakan SKB. Ada juga masyarakat yang mengusulkan agar SKB mengadakan kursus tertentu, misalnya kursus vokal. Meskipun dilaksanakan tiap tahun jumlah kursus yang dilaksanakan di SKB bisa berbeda setiap tahunnya, karena SKB merencanakan bersama Dinas jadi yang bisa dilaksanakan yang disetujui oleh Dinas yang sesuai dengan dana dan fasilitas yang ada. Kemudian pembelajaran tenaga pendidik non formal itu SKB melakukan diklat-diklat untuk PTK Non Formal untuk meningkatkan kompetensi. Kurikulum bahan ajar lebih ke PAUD ya, jadi para pendidik PAUD di Kabupaten Gunungkidul di kumpulkan untuk menciptakan permainan baru, kemudian permainan baru itu disempurnakan, setelah itu baru diterapkan ke PAUD-PAUD lain”.

SB (W.3.3) : “Tahun ini SKB ada empat program, dan itu program rutin ada Pengembangan data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan

Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal atau program Diklat. Diklat diadakan setiap tahun, itu untuk memberikan kompetensi yang lebih baik untuk para PTK Non formal, karena kan tingkat pendidikan PTK itu kan bermacam macam, ada yang sudah lulus S1 ada yang belum, jadi SKB bersama Dinas merasa perlu untuk merencanakan program yang dapat meningkatkan kompetensi PTK non formal melalui Pembelajaran Tenaga Pendidik non Formal tersebut. Kursus juga diadakan tiap tahun karena minat masyarakat mengikuti kursus cukup banyak Mba, banyak yang datang ke SKB untuk bertanya tentang kursus apa yang akan dilaksanakan SKB atau mendaftar kursus, tetapi jumlah kursusnya bisa berbeda tiap tahunnya, tergantung kebutuhan masyarakat dan persetujuan Dinas.”

Rt (W.3.4) : “Program rutin SKB ada Program Kecakapan Hidup atau kursus, Pembelajaran Tenaga Pendidikan non formal biasanya dalam bentuk Diklat. Diklat memang biasanya diadakan tiap tahun Mba, tapi sasarannya berbeda, misalnya jika tahun kemarin diklatnya sasarannya adalah pendidik PAUD, untuk tahun ini diklatnya untuk para tutor PKBM, jadi memang ada pergantian tiap tahunnya. Kemudian, ada Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, dan ada Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar.”

Kesimpulan : UPT SKB Gunungkidul merencanakan empat program yang diadakan rutin setiap tahunnya yaitu, Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal. Perencanaan program dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia.

Apa tujuan UPT SKB Gunungkidul merencanakan program kemitraan ini?

KU (W.4.1) : “SKB ingin memberikan masyarakat kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Kami merencanakan Program kecakapan hidup atau kursus agar masyarakat Gunungkidul memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau membuka usaha sehingga mereka dapat hidup dengan penghasilan yang lebih baik. Begitu juga program pembelajaran pendidik non formal yang tujuannya memberikan kompetensi yang lebih baik bagi para pendidik non formal atau tutor supaya mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan warga belajarnya.”

Hj (W.4.2) : “Tujuannya agar masyarakat Gunungkidul yang tidak mendapatkan pendidikan formal, atau masyarakat yang *drop out* sekolah memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam hal

ini pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat mereka. Dengan pengetahuan maupun keterampilan yang mereka dapatkan melalui pendidikan ini, nantinya dapat mereka manfaatkan untuk memberdayakan diri sendiri, keluarga maupun memberdayakan lingkungan mereka.”

SB (W.4.3) : “Dengan program-programnya SKB ingin bisa memberikan masyarakat kesempatan belajar, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka bisa memperoleh keterampilan dan ilmu yang bisa dipergunakan untuk bekerja, atau bisa juga berwirausaha sehingga masyarakat lebih produktif, mapan secara ekonomi dan minimal bisa memberdayakan dirinya sendiri.”

Rt (W.4.4) : “Tujuannya ya SKB ingin masyarakat yang tidak bisa memperoleh pendidikan formal memiliki kesempatan untuk bisa belajar dan mendapatkan keterampilan, maupun pengetahuan agar mereka menjadi masyarakat yang lebih produktif dan kualitas hidup mereka pun diharapkan dapat lebih baik.”

Kesimpulan : Tujuan SKB Gunungkidul merencanakan program kemitraan adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat khususnya di Gunungkidul untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan, yang nantinya dapat dipergunakan secara produktif untuk bekerja maupun membuka usaha sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

Seperti apa proses perencanaan program yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul?

KU (W.5.1) : “ Proses penyusunan rencana program SKB tentu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Mba, makanya SKB melalui pamong melakukan identifikasi kebutuhan, dari kegiatan tersebut kan diketahui kira-kira apa yang masyarakat butuhkan, kemudian dari identifikasi kebutuhan itu SKB bersama Dinas menyusun atau merencanakan program untuk menjawab kebutuhan mereka. Karena SKB ada di bawah Dinas, jadi perencanaan program SKB perlu melibatkan Dinas untuk mendapatkan persetujuan maupun masukan dari Dinas. Dalam rapat antara Dinas dan SKB nanti akan ada keputusan kira-kira program apa saja yang bisa dilaksanakan dan tidak, karena tidak semua program yang diusulkan itu dapat diterima, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya yang ada. Agar kualitas program SKB semakin baik, program SKB selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, juga selalu mempertimbangkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.”

- Hj (W5.2) : “Untuk prosesnya pihak SKB (Pamong belajar) melakukan identifikasi kebutuhan, kira-kira program apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat, bisa mendengarkan masukan masyarakat langsung ataupun dengan mengumpulkan data-data seperti data jumlah *drop out* sekolah jumlah pengangguran, jumlah dan tingkat pendidikan tutor dan sebagainya. Selain itu karena SKB ini berada di bawah Dinas Gunungkidul, SKB mendengarkan juga masukan dan perlu persetujuan dari Dinas. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan masukan dari Dinas dalam Rakor (Rapat koorDinasi) disusun prioritas program yang dalam satu tahun akan dilaksanakan”.
- SB (W.5.3) : “Untuk proses perencanaan seperti umumnya ya mba, pamong melakukan identifikasi dulu lapangan, masalah apa yang dihadapi, kadang-kadang mba ada masyarakat sendiri yang usul untuk diadakan program tertentu pada SKB, biasanya yang diminta masyarakat itu kebanyakan kursus-kursus mba. Dari identifikasi masalah ini kemudian SKB membuat usulan program ke Dinas. Tidak semua program yang diajukan SKB itu disetujui Mba, karena dananya juga terbatas. Selain itu juga mempertimbangkan sumber daya lain yang dibutuhkan, yang sekiranya bisa dipenuhi baik oleh SKB, Dinas maupun masyarakat. Karena itu perlu rapat koordinasi dulu antara pihak SKB dengan Dinas, itu yang nantinya menentukan program apa saja yang diprioritaskan, yang sekiranya relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dana dan sumber daya lain yang tersedia.”
- Rt (W.5.4) : “Pamong SKB melakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, kira-kira program apa yang dibutuhkan masyarakat, setelah itu hasil dari identifikasi kebutuhan itu SKB mengusulkan ke Dinas untuk melaksanakan program. Usulan program harus mendapat persetujuan Dinas karena bagaimanapun dukungan sumber daya khususnya dana yang nantinya akan dipakai untuk program-program dari Dinas Mba. SKB dan Dinas melakukan rapat untuk membahas program-program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan dan tidak dilaksanakan atau ditunda karena tidak semua program yang diusulkan dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya.”
- Kesimpulan : UPT SKB Gunungkidul melakukan beberapa tahapan dalam perencanaan programnya : 1) UPT SKB (Pamong belajar) melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan. Identifikasi kebutuhan lapangan dilakukan dengan mendengarkan masukan masyarakat ataupun dengan mengumpulkan berbagai data. 2) Sebelum memutuskan prioritas program SKB Gunungkidul terlebih dahulu mendengarkan masukan dari Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. 3). Mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memutuskan prioritas program yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, situasi, dan sumber daya yang tersedia. Setiap program yang direncanakan juga selalu mempertimbangkan pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Lembaga apa saja yang bekerjasama dengan SKB Gunungkidul?

KU (W.6.1) : “ Ada banyak Mba yang bekerjasama dengan SKB baik pemerintah maupun swasta. Lembaga yang bekerjasama dengan SKB ada P2PAUDNI, BPKB DIY, Disdikpora DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM. HIMPAUDI, Forum PAUD, Forum PKBM, LKP, antara lain itu Mba lembaga-lembaga yang biasa bekerjasama dengan SKB”.

Hj (W.6.2) : “ Lingkup kemitraan SKB mulai dari Nasional sampai Kabupaten Mba. Ada P2PAUDNI, Disdikpora DIY, BPKB DIY Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, LKP, forum PAUD Forum PKBM, HIMPAUDI Kabupaten Gunungkidul.”

SB (W.6.3) : “ Yang pasti Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM. Berbagai forum seperti forum PAUD, Forum PKBM, HIMPAUDI, LKP. Itu untuk lingkup Kabupaten Gunungkidul kalau tingkat Provinsi ada BPKB DIY, Disdikpora DIY, untuk tingkat Nasional ada P2PAUDNI.”

Rt (W.6. 4) : “Untuk lingkup Gunungkidul sendiri ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul terutama Bidang PAUDNI, Forum PAUD Gunungkidul, Himpaudi, Forum PKBM, LKP.”

Kesimpulan : SKB Gunungkidul menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Lingkup Nasional SKB Gunungkidul bermitra dengan P2PAUDNI, lingkup Provinsi SKB Gunungkidul bermitra dengan BPKB DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, sedangkan lingkup Kabupaten SKB Gunungkidul bermitra dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, PKBM, berbagai forum seperti Forum PAUD dan Forum PKBM, dan LKP”.

Seberapa penting peran lembaga mitra bagi program-program di SKB Gunungkidul?

KU (W.7.1) : “Lembaga mitra punya peran sangat penting bagi SKB. Tanpa adanya lembaga mitra program SKB tidak akan berjalan optimal, karena itu SKB sangat menghargai lembaga mitra. SKB dan lembaga mitra saling membantu memberikan solusi jika ada

permasalahan. SKB menyadari bahwa masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dengan kemitraan yang baik tentunya akan dapat saling melengkapi satu sama lain.”

- HJ (W.7.2) : “Tentu lembaga mitra memiliki peran yang penting. Tanpa lembaga mitra tentu program di SKB akan terhambat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap program kan banyak dan tidak mungkin dapat dipenuhi SKB sendiri sementara dana, dan fasilitas SKB sangat terbatas. Untuk merencanakan program pun SKB butuh mitra, seperti Dinas misalnya karena dana APBD untuk program di SKB sebagian besar dari Dinas”.
- SB (W.7.3) : “Peran lembaga mitra itu sangat penting, hampir semua program di SKB dilaksanakan dengan bantuan mitra-mitra SKB. Dana, fasilitas yang SKB miliki itu tidak cukup, jadi SKB butuh mitra-mitra untuk membantu memenuhi sumber daya tadi dalam program-programnya. Bahkan dalam mensosialisasikan program ataupun merekrut peserta SKB juga memerlukan peran mitra Mba.”
- Rt (W 7. 4) : “Mitra itu berperan besar Mba, hampir semua program di SKB ini bekerjasama dengan mitra. Dana, fasilitas, narasumber SKB membutuhkan itu dan mendapatkannya dari mitra-mitra SKB. Karena itu SKB selalu menjaga hubungan baik dengan semua mitra, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat Mba.
- Kesimpulan : Lembaga mitra berperan penting bagi program-program di UPT SKB Gunungkidul. Hampir semua program di UPT SKB Gunungkidul dijalankan dengan kemitraan. Dana, fasilitas, Sumber Daya Manusia berupa narasumber teknis ataupun tutor, yang dibutuhkan UPT SKB Gunungkidul didukung oleh lembaga mitra, Oleh karena itu UPT SKB Gunungkidul sangat membutuhkan mitra agar dapat menyelenggarakan program dengan optimal.

Apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan lembaga mitra?

- KU (W.8.1) : “Kalau dengan Dikpora Provinsi, Kabupaten, BPKB perjanjian hitam di atas putih seperti itu tidak ada , jika programnya dari APBD tidak ada perjanjian khusus Mba, tapi kalau program dari pusat yang lewat P2PAUDNI, setelah proposal disetujui memang ada perjanjian yang intinya kesanggupan melaksanakan program”.
- Hj (W.8.2) : Kalau kemitraan dengan Dinas pendidikan tidak ada perjanjian, kemitraan sudah otomatis. Kalau dengan LKP memang ada kesepakatan, tapi tidak ada perjanjian tertulisnya karena kemitraannya hanya ke urusan yang sifatnya teknis saja. Untuk penyaluran lulusan ke tempat usaha atau LKP juga berdasarkan kesepakatan saja. Kalau dengan lembaga pusat seperti P2PAUDNI

perjanjiannya dibuat jika SKB menyelenggarakan program dari sana”.

- SB (W.8.3) : “Kalau kesepakatan secara tidak tertulis pasti ada, karena tidak mungkin menjalin kemitraan kalau tidak sepakat, tapi kalau yang dimaksud perjanjian tertulis setuju saya tidak ada Mba. Kemitraan dengan LKP misalnya untuk tutor atau fasilitas kursus itu, memang ada kesepakatan tapi tidak ada perjanjian tertulisnya, karena memang lembaga mitra tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis jika SKB menyelenggarakan program-program P2PAUDNI, itu setelah prosposal yang diajukan dari SKB disetujui.
- Rt (W.8.4) : “Perjanjian tertulis setuju saya tidak ada Mba, dengan PKBM, LKP, tidak ada perjanjian tertulisnya Mba, karena kerjasamanya lebih pada urusan teknis, seperti pengadaan tutor kursus, atau meminjam fasilitas untuk kursus. Memang ada kesepakatan tapi tidak secara tertulis hitam di atas putih. Dengan Dinas Pendidikan juga tidak ada Mba.
- Id (W.8.5) : “Tidak ada perjanjian khusus antara Dinas dan SKB, sudah terjalin sesuai kewenangannya, jadi tidak memerlukan perjanjian Mba”.
- Nn (W.8.6) : Kalau antara Dinas dan SKB tidak ada perjanjian hitam di atas putih ya Mba, karena kan memang secara kelembagaan SKB berada di bawah kebijakan Dinas”.
- St (W.8.7) : “ Kalau perjanjian tertulis seperti hitam di atas putih tidak ada Mba, hanya kesepakatan yang tidak tertulis, saya dan pamong SKB sudah saling mengenal jadi, tidak harus ada perjanjian tertulis”.
- Kesimpulan : Hubungan kemitraan SKB dengan lembaga lain umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasar kesepakatan saja karena sebagian besar kemitraan dilakukan dalam hal teknis dan lembaga mitra tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis. Sedangkan untuk kemitraan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul tidak memerlukan perjanjian karena kemitraan terjalin dengan otomatis.

Hubungan kemitraan seperti apa yang diterapkan antara SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra?

- KU (W.9.1) : “ Kalau hubungan kemitraannya SKB dengan lembaga mitra lebih ke hubungan yang mutualisme ya Mba, karena memang saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya antara SKB dan Dinas, meskipun Dinas sebagai pembuat kebijakan akan tetapi Dinas tetap membutuhkan pelaksana programnya, yaitu SKB atau

bisa juga PKBM. Setiap lembaga yang menjadi mitra SKB Gunungkidul mempunyai peran masing-masing yang sama-sama penting. SKB menjalin kemitraan dengan lembaga yang menaungi pendidikan nonformal baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat, lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan sama dengan SKB sehingga bisa saling bekerjasama dan melengkapi satu sama lain untuk bisa memberikan masyarakat pendidikan yang baik melalui pendidikan non formal.”

- Hj (W.9.2) : “ Antara SKB dan lembaga mitra bekerjasama sebagai rekan yang saling membutuhkan satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Sebagai lembaga yang sama-sama menaungi pendidikan non formal secara tidak langsung tujuan kami sama, oleh karena itu bisa saling melengkapi dan bekerjasama dengan baik. Misalnya, Dinas sebagai pembuat kebijakan, membutuhkan peran SKB atau PKBM sebagai inisiator dan pelaksana, kemudian lembaga lain seperti LKP itu membantu fasilitas dan tutor, kemudian ada forum forum yang dapat mensosialisasikan program-program SKB. Jadi harus ada kerjasama untuk mensukseskan sebuah program tidak bisa bergerak sendiri sendiri. SKB tidak terlalu mempermasalahkan apakah lembaga itu besar atau kecil yang penting bisa saling bekerjasama dengan baik”.
- SB (W.9.3) : “ Hubungan kemitraan antara SKB dan lembaga mitra itu lebih pada hubungan sebagai rekan kerja yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Tidak memandang status kelembagaan. Meskipun secara kelembagaan SKB berada di bawah Dinas Pendidikan ya Mba, tapi sebagai mitra antara SKB dan Dinas adalah rekan yang menganggap semuanya sama dan sejajar, karena menyadari punya peran masing masing yang sama penting, begitu juga dengan mitra mitra lainnya sama pentingnya bagi SKB, karena mereka sangat mendukung dan membantu SKB. Kalau antara SKB dan lembaga mitra tidak bisa bekerjasama dengan baik, pasti nantinya program yang kami selenggarakan tidak bisa optimal”.
- Rt (W.9.4) : “SKB dan lembaga mitra menjalin hubungan kerjasama sebagai mitra kerja yang saling melengkapi atau istilahnya mutualisme Mba. SKB dan lembaga mitra saling bekerjasama dan bisa saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Contohnya ya mba, SKB menjalin kerjasama dengan LKP mba, SKB kan dapat manfaat bisa mendapatkan narasumber yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Narasumber yang didatangkan di SKB biasanya yang sudah professional mba, bagi LKP itu sendiri namanya bisa di kenal di Gunungkidul dan bagi pemilik LKP atau narasumber yang didatangkan bisa memperoleh pendapatan. Kemudian SKB kan juga menyalurkan lulusan kursus ke beberapa usaha, mereka

biasanya senang Mba kalau ada lulusan SKB yang magang ke tempatnya”.

Id (W.9.5) : “Sebenarnya antara Dinas dan SKB saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dinas sebagai pembuat kebijakan tentunya membutuhkan peran SKB sebagai pelaksana, begitu juga SKB juga perlu dukungan dari Dinas jika ingin menyelenggarakan program. Jadi saling membutuhkan karena masing-masing memiliki peran yang sama-sama penting”.

Nn (W.9.6) : “ Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara kelembagaan SKB memang bawah Dinas, tapi sebagai mitra kami bekerja sama dengan baik tanpa memandang Dinas itu atasan dan SKB itu bawahan. Hubungan kemitraannya ya hubungan sebagai mitra yang memberikan manfaat satu sama lain. Antara Dinas dan SKB membutuhkan satu sama lain, punya peran masing-masing yang sama pentingnya. Tujuan Dinas dan SKB kurang lebih sama Mba, sama-sama ingin memberikan masyarakat Gunungkidul pendidikan yang layak melalui program-program pendidikan non formal.”

St (W.9.7) : “Hubungan PKBM ini dengan SKB sebagai mitra terjalin baik dan saling memberikan manfaat satu sama lain Mba. Ada program-program SKB Gunungkidul yang diselenggarakan bersama dengan PKBM ini, salah satunya Koran Ibu Mba, yang dilaksanakan di PKBM ini, dan program itu akhirnya memberikan manfaat besar bagi PKBM ini dan masyarakat sekitar daerah ini juga Mba.”

Kesimpulan : Hubungan kemitraan yang diterapkan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra cenderung kepada hubungan kemitraan muatualisme atau saling melengkapi satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan, yaitu untuk memberikan masyarakat Gunungkidul pendidikan melalui program-program pendidikan non formal. Kedua belak pihak menyadari pentingnya menjalin kemitraan dan dapat saling memberikan dan mendapatkan manfaat .

Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?

KU (W.10.1) : “Memang ada beberapa manfaat yang diperoleh SKB dari kemitraan, pertama SKB dapat dapat menyelenggarakan program dengan konsisten karena didukung dana, fasilitas, narasumber dari mitra. Manfaat kedua lulusan-lulusan kursus SKB dapat disalurkan. Manfaat ketiga jangkauan program-program SKB juga lebih luas karena kan mitra kami membantu juga dalam mensosialisasikan program”.

- Hj (W.10.2) : “Manfaatnya tentu positif bagi SKB, kelancaran pelaksanaan program SKB juga dipengaruhi oleh lembaga mitra. SKB mendapatkan dukungan dana, fasilitas maupun sumber daya manusia berupa narasumber sehingga program-program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam penyaluran lulusan juga SKB mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan lulusan kursus ke lembaga-lembaga mitra seperti LKP ataupun pemilik usaha seperti salon, rias atau kursus vokal malah sudah ada yang *recording*.”
- SB (W.10.3) : “Manfaatnya antara lain program program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal karena ada dukungan dana, fasilitas, SDM juga. SKB dapat mengatasi kendala-kendala teknis yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan program, program SKB juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas karena lembaga mitra juga membantu mensosialisasikan program SKB. SKB juga memperoleh kemudahan dalam menyalurkan lulusan ke pemilik usaha atau LKP.”
- Rt (W.10.4) : “Manfaat pertama SKB mendapat dukungan sumber daya untuk melaksanakan program sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, manfaat kedua jika ada permasalahan pada program yang dilaksanakan SKB, lebih mudah di atasi karena ada yang membantu memberikan solusi, manfaat ketiga lulusan program khususnya lulusan program kecakapan hidup di SKB dapat disalurkan.
- Id (W.10.5) : “Kalau manfaat, diantaranya ya program yang dimiliki Dinas dapat dilaksanakan dengan konsisten karena ada yang membantu Dinas untuk merancang program, kemudian terjalinnya kerjasama yang semakin baik antara Dinas dengan SKB itu sendiri.”
- Nn (W.10.6) : “Manfaatnya program Dinas dapat dilaksanakan konsisten melalui kerjasama dengan SKB. Dinas lebih mudah merealisasikan program-programnya dengan bantuan SKB sebagai pelaksananya.”
- St (W.10.7) : “Sejauh ini kemitraan manfaatnya positif bagi PKBM Mba, antara lain PKBM bisa menyelenggarakan program baru bagi masyarakat sekitar PKBM ini dengan kerjasama bersama SKB, kemudian tutor PKBM bisa mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh SKB untuk meningkatkan kompetensinya”.
- Kesimpulan : Bagi UPT SKB Gunungkidul kemitraan yang dilakukan memberikan manfaat positif diantaranya program UPT SKB Gunungkidul dapat menyelenggarakan program dengan optimal karena dukungan sumber daya dari lembaga mitra, mendapatkan kemudahan menyalurkan lulusan, program SKB juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Bagi Dinas Pendidikan

Pemuda dan olahraga Gunungkidul manfaat yang diperoleh adalah dapat menyelenggarakan program yang konsisten melalui kerjasama dengan UPT SKB Gunungkidul. PKBM juga memperoleh manfaat yaitu dapat menyelenggarakan baru bagi masyarakat sekitar PKBM dan para tutor PKBM dapat berpartisipasi mengikuti program UPT SKB Gunungkidul untuk meningkatkan kompetensi melalui program diklat.”

Seperti apa bentuk kemitraan SKB dengan lembaga lain?

KU (W.11.1) : “Bentuknya bisa macam-macam Mba. Kalau yang berbentuk dana itu dari Dinas Mba, karena kan dana biasanya dari APBD. Kemudian untuk yang berbentuk tutor atau narasumber Mba, itu bisa dari Dinas juga, dari BPKB, dari Dikpora DIY atau LKP, sedangkan untuk fasilitas peralatan SKB juga bekerjasama dengan lembaga yang punya fasilitas seperti LKP. Kemudian dari Forum PAUD, dan PKBM, dalam bentuk sosialisasi program atau rekrutitmen peserta. Jadi jika ada program SKB melakukan sosialisasi kepada forum tersebut untuk kemudian forum membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau dari P2PAUDNI itu lebih ke program Mba, jadi misalnya P2PAUDNI ada program, dari sana kemudahan mengadakan sosialisasi agar kita dapat mengakses programnya dengan proposal. Ada juga yang bentuknya penyaluran lulusan program Mba, jadi lulusan kursus itu biasanya disalurkan ke pemilik usaha atau LKP.”

HJ (W.11.2) : “Kemitraan yang dijalin selama ini biasanya terkait dengan hal-hal teknis misalnya dalam pemenuhan kebutuhan narasumber dalam setiap program. Narasumber itu bisa dari LKP, Dinas bidang PAUDNI, terkadang juga BPKB Yogyakarta. Kemudian dalam bentuk penyaluran lulusan program ke pemilik beberapa usaha atau LKP. Jika yang berhubungan dengan Dana, SKB menjalin kerjasama dengan Dinas. SKB juga bekerjasama dengan lembaga yang punya fasilitas, misalnya untuk kursus yang butuh peralatan, jika SKB tidak ada dana untuk membeli peralatan, maka SKB menjalin kerjasama dengan LKP yang mempunyai peralatan untuk kursus itu.”

SB (W.11.3) : “Jika dengan Dinas bentuk kerjasamanya biasanya dana, karena dana APBD itu kan lewatnya Dinas ya Mba. Dengan lembaga lain selain Dinas kerjasma bisa dalam bentuk SKB mendatangkan narasumber dari lembaga lain seperti dari BPKB, Dinas provinsi, , kemudian jika ada diklat misalnya, SKB bekerjasama untuk sosialisasi dengan forum-forum seperti forum PAUD, dan PKBM karena kebanyakan peserta berasal dari forum tersebut, jika yang berhubungan dengan PAUD bekerjasama sama juga dengan HIMPAUDI. Kemudian untuk kerjasama dengan para pemilik

usaha atau LKP dalam bentuk pengadaan tutor dan dalam penyaluran lulusan kursus. Ada juga dalam bentuk program, P2PAUDNI kan biasanya punya program, SKB diberikan akses untuk bisa melaksanakan program itu dengan mengajukan proposal.”

Rt (W.11.4) : “Lebih kepada urusan teknis Mba, seperti tutor untuk kursus, kemudian narasumber teknis untuk Diklat, narasumbernya bisa dari Dinas Gunungkidul yang bidang PAUDNI itu, bisa dari BPKB, dari DIKPORA DIY juga bisa, kemudian dengan forum seperti forum PAUD dan PKBM itu bentuknya berupa sosialisasi jika SKB ada program diklat karena umunya peserta diklat itu dari forum-forum tersebut. Kalau dari P2PAUDNI itu lebih ke program Mba, jadi misalnya P2PAUDNI ada program, dari sana kemudian mengadakan sosialisasi agar kita dapat mengakses programnya dengan proposal. Untuk yang berbentuk Dana Mba, sudah pasti dananya jika dana APBD pasti lewat Dinas. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan ada yang berupa penyaluran lulusan.”

Id (W.11.5) : “Bentuknya dana itu pasti karena dana untuk program SKB itu dari Dinas, kemudian untuk diklat kadang-kadang SKB juga meminta narasumber dari Dinas, kemudian dalam bentuk *request* program ke SKB.”

Nn (W.11.6) : “Bentuknya dalam bentuk dana karena dana untuk program biasanya dari Dinas. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan dalam perencanaan program Dinas mengusulkan pada SKB untuk melaksanakan program yang dimiliki oleh Dinas. Kemudian bisa dalam bentuk narasumber juga, biasanya pada diklat-diklat SKB meminta staff Dinas untuk menjadi narasumber atau pembicara”.

St (W.11.7) : “Kalau selama ini dalam bentuk program Mba, jadi ada beberapa program di SKB dilaksanakan bersama dengan PKBM ini, seperti program keaksaraan dan Koran Ibu.”

Kesimpulan : Kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain dilakukan dalam berbagai bentuk seperti dukungan berupa dana yang biasanya didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Kemitraan dalam bentuk fasilitas, narasumber, teknis dan penyaluran lulusan, UPT SKB Gunungkidul bekerja sama dengan LKP, PKBM, maupun lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten maupun Provinsi, BPKB. Kemitraan juga dapat dalam bentuk sosialisasi program melalui berbagai forum seperti forum PAUD, forum tutor, maupun HIMPAUDI. Kemitraan juga dalam bentuk *request* program seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Gunungkidul.

Seperti apa mekanisme kemitraan yang dilakukan oleh UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra?

KU (W.12.1) : “Sederhana saja dan tidak rumit Mba, untuk dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan Gunungkidul, Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagainya lembaga-lembaga seperti itu tidak perlu cara khusus. Untuk kemitraan dengan PKBM ataupun dengan LKP biasanya pamong yang mengusulkan untuk bermitra dengan lembaga tersebut. Biasanya para pamong sudah mengenal secara personal para pengelola PKBM atau LKP, sehingga tidak ada yang rumit, pamong langsung datang atau menghubungi lembaga yang akan diajak bermitra untuk kemudian SKB meminta kerjasama dengan lembaga tersebut. Kalau lembaga tersebut bersedia diajak kerjasama maka kami dan pengelola lembaga tersebut kemudian berdiskusi lebih lanjut lagi membicarakan tentang kerjasama yang akan dilakukan.

Hj (W.12.2) : “Umumnya yang diajak bermitra dengan SKB lembaga-lembaga yang pengelolanya sudah dikenal oleh pihak SKB, pamong SKB yang biasanya mengajukan usulan. jadi antara pamong biasanya saling diskusi untuk menentukan lembaga mana yang bisa memberikan bantuan untuk program SKB atau bekerjasama dengan SKB. Setelah lembaga yang diusulkan disepakati bersama, pihak SKB bisa menghubungi atau mendatangi lembaga yang akan diajak kerjasama. Jika lembaga tersebut bersedia kerjasama maka selanjutnya antara pihak SKB dan lembaga tersebut mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang hal-hal teknis tentang kerjasama yang akan dilakukan. Tidak terlalu rumit, sederhana saja karena SKB kan juga sudah dikenal jadi lembaga yang akan diajak kerjasama juga sudah percaya dan SKB juga berupaya menjalin kerjasama sebaik mungkin sehingga lembaga yang diajak bermitra tidak merasa dirugikan”.

SB (W.12.3) : “Tidak terlalu rumit kok Mba, cukup sederhana. Pertama, pihak SKB kan melihat dulu program apa yang akan dilaksanakan, kemudian pamong-pamong SKB diskusi dan mengajukan usulan kira-kira lembaga mana atau siapa yang bisa membantu untuk diajak kerjasama. Setelah diputuskan bersama, pihak SKB kemudian mendatangi atau menghubungi yang akan diajak kerjasama, kalau yang diajak kerjasama itu LKP untuk masalah narasumber maupun tempat untuk kursus, SKB memberikan penawaran-penawaran tertentu, misalnya tentang kontribusi dengan jumlah tertentu yang diberikan SKB untuk pengelola ataupun narasumber tersebut. Setelah pengelola tersebut bersedia diajak kerjasama, maka SKB membicarakan lebih lanjut hal-hal teknis tentang kerjasama itu. Sederhana karena umumnya yang

diajak bermitra lembaga yang sudah dikenal oleh pamong-pamong SKB dan mitra sudah percaya, jadi tidak terlalu rumit.

Rt (W.12.4) : “Biasanya Mba, yang diajak bermitra dengan SKB lembaga-lembaga yang pengelolanya sudah dikenal oleh pihak SKB, pamong SKB yang biasanya mengajukan usulan. Karena sudah mengenal, pamong SKB hanya perlu datang atau menghubungi lembaga tersebut untuk diajak kerjasama, seperti itu Mba, jadi tidak rumit tidak perlu ada perjanjian dan sebagainya, saling percaya saja, dan selama ini hubungannya juga baik tidak ada masalah Mba”

Kesimpulan : UPT SKB Gunungkidul memiliki mekanisme kemitraan yang sederhana yang dilakukan tanpa prosedur secara khusus dan tidak menyulitkan bagi UPT SKB Gunungkidul maupun bagi lembaga mitra. mekanisme kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra, 1). Para pamong melakukan diskusi tentang calon lembaga yang akan diajak bermitra. 2). Setelah memutuskan calon lembaga yang akan diajak bermitra pihak UPT SKB Gunungkidul menghubungi atau mendatangi langsung calon lembaga mitra untuk kemudian menyampaikan maksud dari kemitraan tersebut.3). Jika calon mitra setuju untuk bekerjasama maka UPT SKB Gunungkidul dan lembaga mitra mengadakan pembicaraan lebih lanjut hal-hal teknis mengenai kemitraan yang akan dilakukan.

Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?

KU (W.13.1) : “Untuk faktor yang menghambat, meskipun menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga pemerintah ya Mba, tapi untuk kemitraan yang bentuknya dana itu agak susah, satu program di SKB tidak bisa dibiayai oleh 2 lembaga pemerintah, kalau dari APBD ya dari Dinas itu. Kalau faktor pendukungnya SKB kan punya banyak lembaga mitra ya, dan sejauh ini hubungan dengan lembaga mitra tidak ada masalah Mba, hubungan SKB dengan lembaga mitra sudah terjalin dengan baik. Para pamong SKB umunya punya *link* ke beberapa lembaga mitra SKB jadi itu mendukung juga Mba.

Hj (W 13. 2) : “Susahnya bermitra dengan lembaga pemerintah bila terkait dengan pendanaan. Maksudnya tidak mungkin satu program dibiayai oleh 2 lembaga pemerintah, padahal sesungguhnya sangat diperlukan. Kalau faktor yang mendukung kemitraan. hubungan SKB dengan lembaga lain yang menjadi mitra ini sudah baik, hubungan ini sudah terjalin sejak lama, sampai saat ini juga masih baik” .

SB (W 13. 3) : “Faktor pendukung kemitraan antara lain dari segi sumber daya Mba, lembaga mitra memiliki sumber daya yang mendukung

program program SKB baik itu dana maupun fasilitas. Kemudian dari segi jaringan atau *link* yang lumayan luas mencakup tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Gunungkidul. Untuk faktor penghambat biasanya dana, untuk dapat melaksanakan program SKB perlu mendapat dukungan dana dari lembaga lainnya akan tetapi sesuai peraturan satu program tidak mungkin dibiayai dua lembaga pemerintah, meskipun itu sangat diperlukan.”

Rt (W 13. 4) : “Yang menjadi faktor pendukung antara lain, pertama dana dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga mitra yang sangat mendukung program-program SKB, faktor kedua SKB memiliki *link* baik dari lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki peran untuk mendukung SKB, faktor ketiga Sumber Daya Manusia, selain pamong SKB membutuhkan narasumber teknis maupun tutor untuk memberikan pembelajaran ataupun materi, narasumber teknis ataupun tutor biasanya didatangkan dari lembaga lain.”

Id (W 13. 5) : “Faktor yang menghambat saya rasa tidak ada Mba, semuanya terjalin dengan baik, baik dari SKB maupun Dinas saling menjaga hubungan baik. Kalau faktor yang mendukung, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas bisa mendukung program-program SKB.”

Nn (W 13. 6) : “ Selama ini saya rasa tidak ada hambatan, karena kemitraan yang terjalin antara SKB dan Dinas sudah baik. Faktor yang mendukung antara SKB dengan Dinas saling membutuhkan dan antara SKB dan Dinas selalu berusaha menjalankan program yang direncanakan bersama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran masing-masing

St (W 13. 7) : “Hubungan dengan SKB selama ini baik Mba, jadi saya rasa tidak ada hambatan. Program-program yang dijalankan antara PKBM dengan SKB selama ini berjalan dengan baik dan masyarakat disini senang dengan program tersebut.

Keseimpulan : Faktor pendukung kemitraan UPT SKB Gunungkidul antara lain, Faktor sumber daya, baik dana maupun fasilitas dari lembaga mitra yang mendukung program UPT SKB Gunungkidul, jaringan atau *link* yang dimiliki oleh UPT SKB Gunungkidul baik lembaga pemerintah maupun swasta yang melingkupi tingkat Nasional, Provinsi,dan Kabupaten. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu meskipun banyak lembaga yang menjadi mitra UPT SKB Gunungkidul akan tetapi sesuai peraturan satu program hanya dapat dibiayai satu lembaga pemerintah.”

Catatan Lapangan I

Hari / tanggal : Kamis, 20 Juni 2013

Waktu : 10.00-12.00

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Observasi awal dan meminta izin penelitian

Deskripsi kegiatan :

Hari ini peneliti pada pukul 10.00 WIB datang ke SKB Gunungkidul di jalan Pemuda No.21 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul untuk melakukan observasi awal. Sebelum itu peneliti beretemu dengan Kepala SKB Gunungkidul dan Pamong untuk meminta izin dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan.

Kepala SKB Gunungkidul yaitu Ys (Kepala SKB Gunungkidul lama), menyambut baik maksud kedatangan peneliti dan bersedia membantu peneliti untuk mendapatkan informasi awal mengenai SKB Gunungkidul. Peneliti kemudian memulai dengan diskusi santai dengan Ys mengenai UPT SKB Gunungkidul. Karena saat Ys sedang ada kepentingan lain, maka diskusi tidak berlangsung lama dan Ys menyarankan untuk langsung berdiskusi dengan Pamong yang ada di SKB Gunungkidul. Peneliti kemudian melakukan diskusi ringan dengan pamong belajar mengenai program-program yang ada di UPT SKB Gunungkidul. Setelah selesai melakukan diskusi ringan peneliti mohon pamit, tetapi sebelumnya membuat janji dengan pamong UPT SKB Gunungkidul untuk melakukan wawancara di lain hari.

Catatan Lapangan II

Hari / tanggal : Kamis, 5 September 2013

Waktu : 09-11.30

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Wawancara dengan Kepala dan pamong UPT SKB Gunungkidul

Deskripsi Kegiatan :

Pada hari ini pada pukul 09.00 WIB, peneliti datang ke UPT SKB Gunungkidul untuk mengadakan wawancara mengenai program yang ada di UPT SKB Gunungkidul dengan lebih mendalam. Pertama-tama peneliti bertemu dengan KU selaku kepala UPT SKB Gunungkidul baru untuk mengadakan wawancara. Karena KU adalah kepala UPT SKB Gunungkidul yang baru, maka pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud peneliti untuk mengambil data di UPT SKB Gunungkidul. KU menerima maksud peneliti dengan baik dan bersedia memberikan informasi. Wawancara dengan KU selaku Kepala UPT SKB Gunungkidul untuk mengetahui mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya UPT SKB Gunungkidul, selain itu wawancara ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai program yang ada di UPT SKB Gunungkidul. Selain wawancara mengenai program yang ada di UPT SKB Gunungkidul, peneliti juga mewawancarai untuk mengenai kemitraan UPT SKB Gunungkidul.

Peneliti bertanya “Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?

KU menjawab “Alasannya sumber daya SKB ini kan terbatas, sedangkan untuk bisa melaksanakan program SKB kan butuh fasilitas, dana, narasumber. Hampir semua program yang Kami selenggarakan bermitra dengan lembaga lain Mba, karena SKB kan punya keterbatasan. SKB punya pamong yang dapat merancang program, tapi Dana, fasilitas, narasumber, hal-hal seperti itu yang menjadi kendala Kami, jadi kami membutuhkan pihak lain untuk mengatasi kendala

tersebut. SKB memang punya fasilitas tetapi kan tidak lengkap misalnya untuk kursus potong rambut, SKB tidak punya peralatan potong rambut makanya SKB bekerja sama dengan lembaga lain, pamong di SKB juga tidak ada yang bisa potong rambut, makanya butuh narasumber dari luar. Jadi ya itulah mengapa SKB butuh kerjasama dengan

Peneliti bertanya “Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program kemitraan SKB Gunungkidul?”

KU menjawab “SKB kan dibawah Dinas, jadi dari Dinas dilibatkan juga, selain dari Dinas, SKB melihat program apa yang akan dilaksanakan, intinya keterlibatan pihak luar disesuaikan dengan program apa yang akan dilaksanakan. Kalau lingkup SKB sendiri ada kepala SKB, TU, pamong, untuk yang di luar SKB biasanya ada Dinas. Selain itu SKB juga menjalin mitra dengan lembaga lain, ada Forum-forum seperti Forum tutor, Forum PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi, LPK, tapi untuk yang selain Dinas seperti tadi yang sudah saya katakan keterlibatan pihak di luar SKB disesuaikan. Kalau masyarakat keterlibatannya dengan memberikan usulan program kepada pamong, kemudian usulan masyarakat itu kami tampung untuk diajukan dalam rapat perencanaan program, nanti usulan tersebut bisa dilaksanakan atau bisa juga tidak.”

Peneliti bertanya “Seperti apa proses perencanaan program yang dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul?”

KU menjawab “Proses penyusunan rencana program SKB tentu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Mba, makanya SKB melalui pamong melakukan identifikasi kebutuhan, dari kegiatan tersebut kan diketahui kira-kira apa yang masyarakat butuhkan, kemudian dari identifikasi kebutuhan itu SKB bersama Dinas menyusun atau merencanakan program untuk menjawab kebutuhan mereka. Karena SKB ada di bawah Dinas, jadi perencanaan program SKB perlu melibatkan Dinas untuk mendapatkan persetujuan maupun masukan dari Dinas. Dalam rapat antara Dinas dan SKB nanti akan ada keputusan kira-kira program apa saja yang bisa dilaksanakan dan tidak, karena tidak semua program yang diusulkan itu dapat diterima, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya yang ada. Agar kualitas program SKB semakin baik, program SKB selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, juga selalu mempertimbangkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.”

Peneliti bertanya “Seberapa penting peran lembaga mitra bagi program-program di SKB Gunungkidul?”

KU menjawab “Lembaga mitra punya peran sangat penting bagi SKB. Tanpa adanya lembaga mitra program SKB tidak akan berjalan optimal, karena itu SKB sangat menghargai lembaga mitra. SKB dan lembaga mitra saling membantu memberikan solusi jika ada permasalahan. SKB menyadari bahwa masing masing

mempunyai kelebihan dan kekurangan, dengan kemitraan yang baik tentunya akan dapat saling melengkapi satu sama lain.”

Peneliti bertanya “Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?”

KU menjawab “Memang ada beberapa manfaat yang diperoleh SKB dari kemitraan, pertama SKB dapat dapat menyelenggarakan program dengan konsisten karena didukung dana, fasilitas, narasumber dari mitra. Manfaat kedua lulusan-lulusan kursus SKB dapat disalurkan. Manfaat ketiga jangkauan program-program SKB juga lebih luas karena kan mitra kami membantu juga dalam mensosialisasikan program.”

Peneliti bertanya “seperti apa bentuk kemitraan yang dilaksanakan SKB dengan lembaga lain?”

KU menjawab “ Bentuknya bisa macam-macam mba, sesuai kebutuhan SKB. Kalau bentuk kemitraannya, kalau yang berbentuk dana itu dari Dinas Mba, karena kan dana biasanya dari APBD. Kemudian untuk yang berbentuk tutor atau narasumber Mba, itu bisa dari Dinas juga, dari BPKB. dari Dikpora DIY atau LKP. Untuk fasilitas peralatan juga SKB bekerjasama dengan lembaga yang punya fasilitas seperti LKP. Kemudahan dari Forum PAUD, dan PKBM, dalam bentuk sosialisasi program atau rekrutimen peserta. Jadi jika ada program SKB melakukan sosialisasi kepada forum tersebut untuk kemudian forum membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau dari P2PAUDNI itu lebih ke program Mba, jadi misalnya P2PAUDNI ada program, dari sana kemudahan mengadakan sosialisasi agar kita dapat mengakses programnya dengan proposal. Ada juga yang bentuknya penyaluran lulusan program Mba, jadi lulusan kursus itu biasanya disalurkan ke pemilik usaha atau LKP”.

Setelah bertemu dengan KU, peneliti kemudian bertemu dengan Rt, pamong belajar, Peneliti mengadakan wawancara mengenai program yang ada di UPT SKB Gunungkidul dan mengenai kemitraan UPT SKB Gunungkidul.

Peneliti bertanya “Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?

Rt Menjawab “Karena sumber daya yang dimiliki SKB terbatas Mba. Dari dana terbatas, fasilitas terbatas, terus untuk narasumber misalnya SKB harus mendatangkan orang lain di luar SKB. Program-program yang dilaksanakan SKB umumnya kerjasama dengan lembaga lain. Kami memerlukan dukungan karena dalam membuat program banyak yang dibutuhkan, dari mulai dana, fasilitas, narasumber. Dengan kerjasama dengan lembaga lain, paling tidak permasalahan tadi dapat diatasi.”

Peneliti bertanya “Apa saja rencana program yang akan dilaksanakan UPT SKB Gunungkidul pada tahun ini?”

Rt menjawab “Program rutin SKB ada program kecakapan hidup atau kursus, Pembelajaran Tenaga Pendidikan non formal biasanya dalam bentuk Diklat. Diklat memang biasanya diadakan tiap tahun Mba, tapi sasarannya berbeda. Misalnya: jika tahun kemarin diklatnya sasarannya adalah pendidik PAUD, untuk tahun ini diklatnya untuk para tutor PKBM, jadi memang ada pergantian tiap tahunnya. kemudian ada Pengembangan data, Informasi Pendidikan Non Formal, dan ada Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar.”

Peneliti bertanya “Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?”

Rt menjawab “Yang menjadi faktor pendukung antara lain, pertama dana dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga mitra yang sangat mendukung program-program SKB, faktor kedua SKB memiliki link baik dari lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki peran untuk mendukung SKB, faktor ketiga sumber daya manusia, selain pamong SKB membutuhkan narasumber teknis maupun tutor untuk memberikan pembelajaran ataupun materi, narasumber teknis ataupun tutor biasanya didatangkan dari lembaga lain.”

Setelah bertemu dengan Rt peneliti berniat melakukan wawancara dengan Hj, akan tetapi Hj tidak ada di tempat karena sedang melakukan tugas Dinas di luar UPT SKB Gunungkidul. Pada hari ini hanya ada beberapa pamong tidak ada di UPT SKB Gunungkidul karena ada kepentingan di luar UPT SKB Gunungkidul. Setelah wawancara dengan Ibu “Rt” Peneliti memohon izin untuk pamit pulang

Catatan Lapangan III

Hari / tanggal : Selasa, 10 September 2013

Waktu : 09.00-10.00

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Wawancara dengan Pamong UPT SKB Gunungkidul

Deskripsi Kegiatan

Pada hari ini bertemu dan wawancara dengan salah satu pamong UPT SKB Gunungkidul yaitu SB. Dalam wawancara yang berlangsung selama 45 menit tersebut, peneliti mendapatkan banyak informasi mengenai kemitraan UPT SKB Gunungkidul dengan lembaga lain yang ada di Gunungkidul

Peneliti bertanya “Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul ?”

SB menjawab “Alasan utamanya masalah sumber daya ya Mba karena program SKB kan butuh dana besar, fasilitas, narasumber, yang tidak semuanya dimiliki SKB, makanya SKB butuh mitra. selain itu SKB juga membutuhkan mitra untuk penyaluran lulusan Mba . Lulusan kursus ada yang magang ditempat usaha seperti salon atau rias pengantin Mba, jadi nantinya keterampilan mereka dapat terasah dan dapat pengalaman kerja juga. Biasanya Mba, yang punya salon atau rias itu senang Mba, jika ada lulusan SKB yang magang di tempat mereka.”

Peneliti menanyakan “Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?”

SB menjawab “Manfaatnya antara lain program program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal karena ada dukungan dana, fasilitas, SDM juga. SKB dapat mengatasi kendala-kendala teknis yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan program, program SKB juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas karena lembaga mitra juga membantu mensosialisasikan program SKB. SKB juga memperoleh kemudahan dalam menyalurkan lulusan ke pemilik usaha atau LPK .”

Peneliti menanyakan “seperti apa bentuk kemitraan yang dilaksanakan SKB dengan lembaga lain?”

SB menjawab “Jika dengan Dinas bentuk kerjasamanya biasanya dana, karena dana APBD itu kan lewatnya Dinas ya Mba. Dengan lembaga lain selain Dinas kerjasama bisa dalam bentuk SKB mendatangkan narasumber dari lembaga lain

seperti dari BPKB, Dinas provinsi, , kemudian jika ada diklat misalnya, SKB bekerjasama untuk sosialisasi dengan forum-forum seperti forum PAUD, dan PKBM karena kebanyakan peserta berasal dari Forum tersebut, jika yang berhubungan dengan PAUD bekerjasama sama juga dengan HIMPAUDI. Kemudian untuk kerjasama dengan para pemilik usaha atau LKP dalam bentuk pengadaan tutor dan dalam penyaluran lulusan kursus. Ada juga dalam bentuk program, P2PAUDNI kan biasanya punya program,SKB diberikan akses untuk bisa melaksanakan program itu dengan mengajukan proposal.”

Peneliti menanyakan “Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?”

SB menjawab “Faktor pendukung kemitraan antara lain dari segi sumber daya Mba, lembaga mitra memiliki sumber daya yang mendukung program program SKB baik itu dana maupun fasilitas. Kemudian dari segi jaringan atau link yang lumayan luas mencakup tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Gunungkidul. Untuk faktor penghambat biasanya dana, untuk dapat melaksanakan program SKB perlu mendapat dukungan dana dari lembaga lainnya akan tetapi sesuai peraturan satu program tidak mungkin dibiayai dua lembaga pemerintah, meskipun itu sangat diperlukan.”

Setelah menemui SB, peneliti kemudian pergi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menemui Nn, selaku staff bidang PAUDNI, akan tetapi setelah sampai di Ruang bidang PLS Nn tidak ada di tempat, karena sedang mengikuti acara yang diadakan Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena tidak dapat menemui Nn pada hari ini, peneliti memutuskan bahwa hari ini hanya menyerahkann surat penelitian kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan berencana melakukan wawancara di lain hari.

Catatan Lapangan IV

Hari / tanggal : Rabu, 18 September 2013

Waktu : 09.00-11.00

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Wawancara dengan staf *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

Deskripsi Kegiatan

Hari ini peneliti datang ke *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul* sekitar pukul 09.00, peneliti berencana untuk mengadakan wawancara dengan Nn selaku Staff *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul*. Karena sebelumnya belum membuat janji dengan Nn, peneliti harus menunggu Nn yang sedang ada acara. Setelah menunggu sekitar 60 menit, akhirnya peneliti dapat bertemu dengan Nn. Sebelum memulai wawancara peneliti menyampaikan maksud peneliti untuk mewawancarai Nn. Nn menyambut baik maksud peneliti dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Saat melakukan wawancara Nn menyarankan agar peneliti juga mewawancarai Id, yang merupakan staff *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga* karena dianggap memiliki banyak informasi mengenai program bersama UPT SKB Gunungkidul. Setelah menemui Nn, maka peneliti berencana menemui Id untuk melakukan wawancara, akan tetapi Id, tidak dapat melakukan wawancara pada hari ini karena sedang sibuk melaksanakan tugas dari Dinas, akhirnya peneliti hanya meminta nomor kontak Id, untuk kemudian membuat janji di lain hari untuk melakukan wawancara.

Catatan Lapangan V

Hari / tanggal : Kamis, 3 Oktober 2013

Waktu : 09.15-11.30

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Wawancara dengan pamong UPT SKB Gunungkidul

Deskripsi Kegiatan

Hari ini peneliti datang ke UPT SKB Gunungkidul untuk melakukan wawancara dengan salah satu pamong yaitu Hj. Peneliti sampai ke UPT SKB Gunungkidul sekitar pukul 09.15, akan tetapi ternyata Hj sedang ada kepentingan sehingga peneliti harus menunggu untuk wawancara dengan Hj. Setelah menunggu sekitar 35 menit akhirnya peneliti dapat melakukan wawancara dengan Hj, wawancara ini untuk mengetahui mengenai perencanaan dan kemitraan UPT SKB Gunungkidul.

Peneliti bertanya “Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program kemitraan SKB Gunungkidul?”

Hj menjawab “Umumnya ada pihak di luar SKB yang terlibat dalam perencanaan program di SKB, Ini terkait dengan sumber daya yang nantinya diperlukan dalam setiap program. Selain dari SKB tentu Dinas juga dilibatkan dalam perencanaan program karena program yang nanti akan dilaksanakan harus melalui persetujuan Dinas. Kalau dari pihak SKB ada kepala UPT SKB, Kasubag TU, pamong, kalau dari pihak luar Dinas misalnya ada Koordinator Penilik, Kasi PAUD dan Kasi PLS, juga ada Forum-forum seperti Forum tutor, Forum PKBM dan Forum PAUD, Himpaudi, LKP jika itu untuk program kursus. Tapi itu juga tergantung program apa yang nantinya akan dilaksanakan, yang pasti disesuaikan.”

Peneliti menanyakan “Apa alasan yang melatarbelakangi kemitraan UPT SKB Gunungkidul?”

Hj menjawab “Ada beberapa alasan mengapa SKB melakukan kemitraan pertama memang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. SKB tidak mungkin melakukan program secara mandiri karena sumber daya yang dimiliki SKB itu terbatas, kedua untuk menjaga mutu program termasuk mutu output program,

ketiga penyaluran lulusan program. Para lulusan kecakapan hidup itu sebagian disalurkan ke berbagai tempat misalnya salon, rias pengantin, penjahit meskipun tidak semuanya, karena ada juga lulusan kursus yang memilih membuka usaha sendiri. Itu juga bagian dari kemitraan yang dilakukan SKB.”

Peneliti menanyakan”Hubungan kemitraan seperti apa yang diimplemntasikan antara SKB Gunungkidul dengan lembaga mitra?”

Hj menjawab “Antara SKB dan lembaga mitra bekerjasama sebagai rekan yang saling membutuhkan satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Sebagai lembaga yang sama-sama menaungi pendidikan non formal secara tidak langsung tujuan kami sama, oleh karena itu bisa saling melengkapi dan bekerjasama dengan baik. misalnya Dinas sebagai pembuat kebijakan,membutuhkan peran SKB atau PKBM sebagai inisiator dan pelaksana, kemudian lembaga lain seperti LKP itu membantu memberikan dukungan fasilitas dan narasumber, kemudian ada forum forum yang dapat mensosialisasikan program-program SKB. Jadi harus ada kerjasama untuk mensukseskan sebuah program tidak bisa bergerak sendiri sendiri. SKB tidak terlalu mempermasalahkan apakah lembaga itu besar atau kecil yang penting bisa saling bekerjasama dengan baik”.

Peneliti menanyakan “Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?”

Hj menjawab “Manfaatnya tentu positif bagi SKB, kelancaran pelaksanaan program SKB juga dipengaruhi oleh lembaga mitra. SKB mendapatkan dukungan dana, fasilitas maupun sumber daya manusia berupa narasumber sehingga program-program SKB dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam penyaluran lulusan juga SKB mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan lulusan kursus ke lembaga-lembaga mitra seperti LPK ataupun pemilik usaha seperti salon, rias atau kursus vokal malah sudah ada yang recording.”

Setelah wawancara dengan Hj selesai, peneliti datang ke ruangan tata usaha untuk meminta beberapa data mengenai program di SKB Gunungkidul. Setelah cukup mendapatkan data peneliti mohon izin untuk pulang.

Catatan Lapangan VI

Hari / tanggal : Rabu, 16 Oktober 2013

Waktu : 10.00-11.00

Tempat : UPT SKB Gunungkidul

Kegiatan : Wawancara dengan staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Deskripsi Kegiatan

Hari ini peneliti datang ke Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menemui ibu "Id", setelah sebelumnya membuat janji lewat telepon. Setelah sampai di UPT SKB Gunungkidul peneliti langsung menemui Id. Sebelum melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud peneliti. Id menerima dengan senang hati maksud peneliti dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Peneliti menanyakan informasi tentang kemitraan antara Dinas dengan UPT SKB Gunungkidul.

Peneliti bertanya "Apakah lembaga ini dilibatkan dalam perencanaan program kemitraan UPT SKB Gunungkidul?"

Id menjawab "Dinas memang terlibat Mba dalam perencanaan program SKB karena program yang dilaksanakan SKB perlu mendapatkan persetujuan dari Dinas sebagai pembuat kebijakan. Dana untuk program SKB memang kebanyakan dari APBD Mba, jadi ada anggaran dari Dinas untuk SKB Mba. Tidak semua usulan program SKB bisa kami terima karena anggaran dananya memang terbatas, jadi programnya harus menyesuaikan anggaran yang tersedia, tidak semuanya bisa dilaksanakan. Dinas juga bisa memberikan masukan program pada SKB, jadi Dinas meminta programnya untuk dilaksanakan oleh SKB dengan pertimbangan SKB kan punya pamong yang bisa merancang program, tapi untuk dana, fasilitas dan sebagainya Dinas membantu menyediakan."

Peneliti bertanya "Apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan lembaga mitra dalam hal ini UPT SKB Gunungkidul?"

Id menjawab “Tidak ada perjanjian khusus antara Dinas dan SKB, sudah terjalin sesuai kewenangannya, jadi tidak memerlukan perjanjian Mba”.

Peneliti bertanya “Apa saja manfaat yang diperoleh lembaga ini dari kemitraan yang selama ini dilaksanakan?”

Id menjawab “Kalau manfaat, diantaranya ya program yang dimiliki Dinas dapat dilaksanakan karena ada yang membantu Dinas untuk merancang program, kemudian terjalinnya kerjasama yang semakin baik antara Dinas dengan SKB itu sendiri.”

Peneliti bertanya “apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?”

Id menjawab “Faktor yang menghambat saya rasa tidak ada Mba, semuanya terjalin dengan baik, baik dari SKB maupun Dinas saling menjaga hubungan baik. Kalau faktor yang mendukung sumber daya yang dimiliki oleh Dinas yang bisa mendukung program-program SKB.”

Setelah menyelesaikan wawancara dengan ibu “Id” Peneliti mengucapkan terimakasih dan mohon pamit.

Catatan Lapangan VII

Hari / tanggal : Selasa, 22 Oktober 2013

Waktu : 15.00-16.00

Tempat : PKBM Sembada

Kegiatan : wawancara dengan pengelola PKBM Sembada

Deskripsi Kegiatan

Hari ini peneliti mendatangi salah satu lembaga mitra UPT SKB Gunungkidul yaitu PKBM Sembada untuk wawancara pengelola PKBM mengenai kemitraan yang dilakukan PKBM Sembada dengan UPT SKB Gunungkidul. Karena sebelumnya telah membuat janji terlebih dahulu peneliti tidak ada kesulitan untuk menemui pengelola, dan pengelola menyambut baik kedatangan peneliti. Pengelola PKBM Sembada bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Peneliti menanyakan “Hubungan kemitraan seperti apa yang diimplementasikan lembaga ini dengan SKB Gunungkidul”.

St menjawab “Hubungan PKBM ini dengan SKB sebagai mitra terjalin baik dan saling memberikan manfaat satu sama lain Mba. Ada program-program SKB Gunungkidul yang diselenggarakan bersama dengan PKBM ini, salah satunya Koran Ibu Mba, yang dilaksanakan di PKBM ini, dan program itu akhirnya memberikan manfaat besar bagi PKBM ini dan masyarakat sekitar daerah ini juga Mba.”

Peneliti menanyakan “apakah ada perjanjian khusus yang dibuat dengan SKB Gunungkidul?”

St menjawab “ Kalau perjanjian tertulis seperti hitam di atas putih tidak ada Mba, hanya kesepakatan yang tidak tertulis, saya dan pamong SKB sudah saling mengenal jadi, tidak harus ada perjanjian tertulis”.

Peneliti menanyakan “Bagaimana manfaat yang diperoleh dari kemitraan yang terjalin antara lembaga ini dengan UPT SKB Gunungkidul”

St menjawab “Sejauh ini kemitraan manfaatnya positif bagi PKBM Mba, antara lain PKBM bisa menyelenggarakan program baru bagi masyarakat sekitar PKBM ini dengan kerjasama bersama SKB, kemudian tutor PKBM bisa mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh SKB untuk meningkatkan kompetensinya”.

Peneliti menanyakan “apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan?”

St menjawab “Hubungan dengan SKB selama ini baik Mba, jadi saya rasa tidak ada hambatan. Program-program yang dijalankan antara PKBM dengan SKB selama ini berjalan dengan baik dan masyarakat disini senang dengan program tersebut.”

Setelah dirasa cukup mendapat informasi peneliti mengucapkan terimakasih dan mohon izin untuk pamit.

Struktur Organisasi UPT SKB Gunungkidul

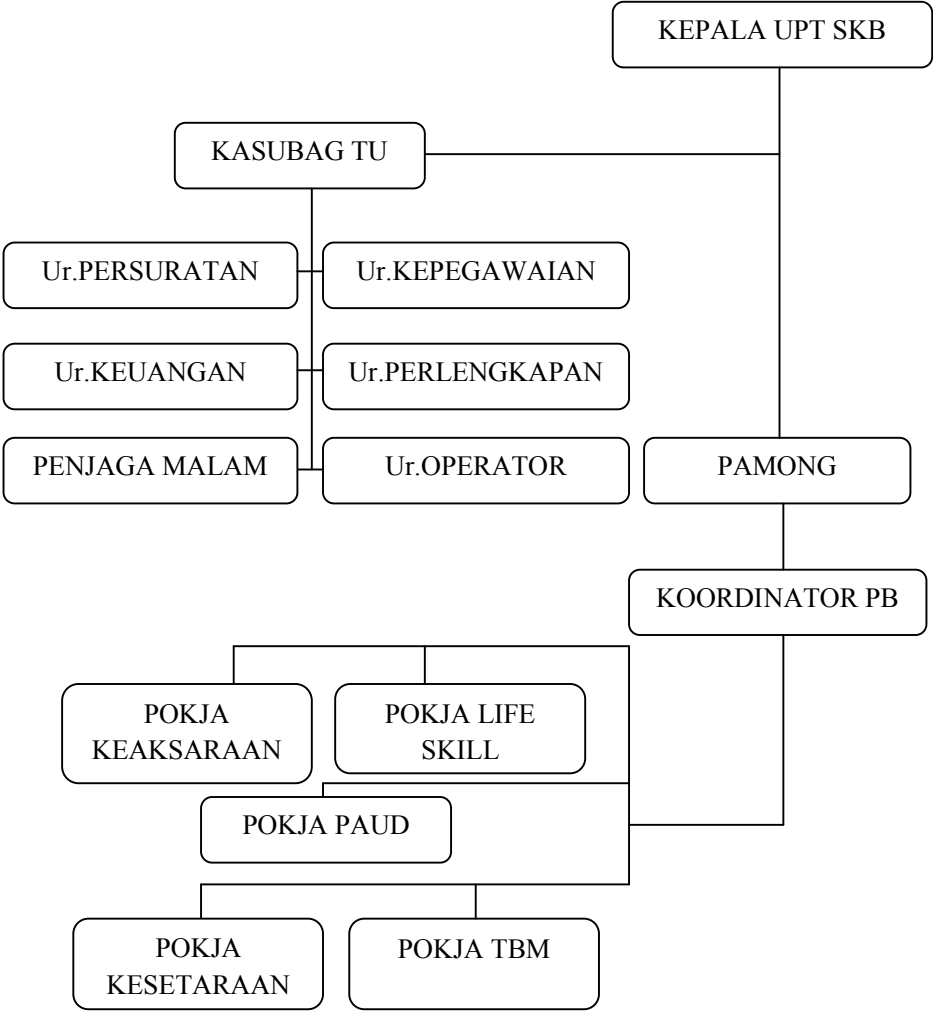


FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Kegiatan rapat koordinasi perencanaan program



Rapat koordinasi sosialisasi program diklat dengan forum PKBM di Gunungkidul



Rapat koordinasi sosialisasi program diklat dengan forum PKBM di Gunungkidul

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kahyanto Utomo, SIP
NIP : 19650515 198602 1 008
Jabatan : Kepala UPT SKB Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan" dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 5 September 2013

Kepala UPT SKB Gunungkidul,



Kahyanto Utomo, SIP

NIP 19650515 198602 1 008

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Juwita, S.Pd
NIP : 19670205 199802 2 001
Jabatan : Pamong UPT SKB Gunungkidul

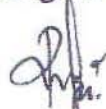
Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 5 september 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan" dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 5 September 2013,
Pamong UPT SKB Gunungkidul



Ratna Juwita, S. Pd
NIP 19670205 199802 2 001

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah, S.Pd
NIP : 19670905 199003 2 006
Jabatan : Pamong UPT SKB Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

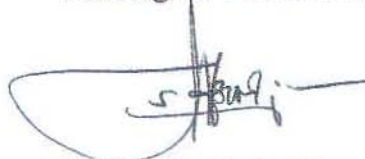
Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 10 september 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan" dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 10 September 2013

Pamong UPT SKB Gunungkidul



Siti Badriyah, S. Pd

NIP 19670905 199003 2 006

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Suharjiya, MA
NIP : 19660511 199512 1 003
Jabatan : Pamong UPT SKB Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan” dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 3 Oktober 2013

Pamong UPT SKB Gunungkidul



Drs. Suharjiya, MA

NIP 19660511 199512 1 003

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Indri Prihatiningtyas
NIP : 19660720 199303 2 008
Jabatan : Kasi Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :


Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan” dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 16 Oktober 2013

Kasi Dikmas Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Gunungkidul



Dra. Indri Prihatiningtyas
NIP 19660720 199303 2 008

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah, S.Pd
Jabatan : Pengelola PKBM Sembada

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 guna memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan" dan hasilnya sesuai dengan yang terlampir.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wonosari, 22 Oktober 2013

Pengelola PKBM Sembada





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp. (0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 4647/UN34.11/PL/2013
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

25 Juli 2013

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Putri Indraningrum
NIM : 09102241029
Prodi/Jurusan : PLS/PLS
Alamat : Kauman, Widodaren, Ngawi

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SKB Gunung Kidul
Subyek : Kepala SKB, Pamong, Pengelola Lembaga Mitra
Obyek : Pengembangan Program dengan Kemitraan
Waktu : Juli-September 2013
Judul : Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul melalui Model Kemitraan

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 19600902 198702 1 0017

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Wakil Dekan I FIP
 3. Ketua Jurusan PLS FIP
 4. Kabag TU
 5. Kasubbag Pendidikan FIP
 6. Mahasiswa yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6146/N/7/2013

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY

Nomor : 4647/JN34.11/PL/2013

Tanggal : 25 Juli 2013

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : PUTRI INDRANINGRUM

NIP/NIM : 09102241029

Alamat : KARANGMALANG, YOGYAKARTA

Judul : PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) GUNUNGKIDUL
MELALUI MODEL KEMITRAAN

Lokasi : GUNUNG KIDUL Kota/Kab. GUNUNG KIDUL

Waktu : 29 Juli 2013 s/d 29 Oktober 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Juli 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Gunung Kidul Cq. KPPTSP
3. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY
4. Yang Bersangkutan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580129-198503 2 003



SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 596/KPTS/IX/2013

Membaca : Surat dari Setda DIY, Tanggal 29/07/2013, Nomor : 070/6146/V/7/2013 ,
hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **PUTRI INDRANINGRUM NIM : 09102241029**
Fakultas/Instansi : Ilmu Pendidikan / Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Instansi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Kauman, Widodaren, Yogyakarta
Kebutuhan : Izin penelitian dengan judul "PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) GUNUNGKIDUL MELALUI MODEL KEMITRAAN"
Lokasi Penelitian : SKB Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Wisni Septianti, M.Pd. dan Dr.Iis Prasetyo, M.M.
Waktunya : Mulai tanggal : 04/09/2013 sd. 29/10/2013
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala
Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab.
Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan
hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 04 September 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala SKB Kabupaten Gunungkidul ;



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
UPT SKB GUNUNGKIDUL**

Alamat : Pemuda No. 21 Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55811

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 421/099

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAHYANTO UTOMO, SIP
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 15 Mei 1965
NIP : 19650515 198602 1 008
Jabatan : Kepala UPT SKB Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : PUTRI INDRANINGRUM
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 2 Maret 1991
NIM : 09102241029
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Telah selesai melakukan penelitian di UPT SKB Gunungkidul, Alamat : Jalan Pemuda No 21 Baleharjo Wonosari Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul melalui Model Kemitraan"***.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Wonosari, 25 Oktober 2013

Kepala UPT SKB Gunungkidul



KHAHYANTO UTOMO.,SIP
NIP 19650515 198602 1 008